

LAPORAN KEUANGAN A U D I T E D TINGKAT UAPPA-W



T.A 2025

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Pengawas Pemilihan Umum. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tanjungpinang, 07 Mei 2026

Kepala Satuan Kerja,



Ridwan, S.H

Pembina/IV.a

NIP. 198507092010011020

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
PERTANGUNGJAWABAN.	iii
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN.....	1
A. LAPORAN KEUANGAN UAPPA-W	4
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	4
2. LAPORAN NERACA	5
3. LAPORAN OPERASIONAL.....	6
4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	8
B. PENJELASAN UMUM BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU	9
C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	22
D. PENJELASAN ATAS POS POS NERACA	35
E. PENJELASAN ATAS POS POS LAPORAN OPERASIONAL	48
F. PENJELASAN ATAS POS POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	56
G. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA	59
LAMPIRAN.....	64

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Tingkat UAPPA-W T.A 2025 Unaudited yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tanjungpinang, 15 Februari 2025

Kuasa Pengguna Anggaran,



RIDWAN, S.H

NIP. 198507092010011020

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara per 31 Desember 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 19,988,340,00.

Realisasi Belanja Negara per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 42,124,562,139,00 atau mencapai 93,46 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp45,073,063,000,00.

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025.

Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp 7,265,514,844,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 0,00, Aset Tetap sebesar Rp 7,105,273,028,00, Aset Lainnya Rp 160,241,816,00.

Total Nilai Kewajiban dan Ekuitas Rp 7,265,514,844,00 yang terdiri dari nilai kewajiban sebesar Rp 174,259,371,00 dan nilai ekuitas sebesar Rp 7,091,255,473,00.

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 0,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp 42,783,357,154,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp 42,783,357,154,00). Surplus Kegiatan Non Operasional dan Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp 16,081,008,00 dan sebesar Rp 0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp 42,767,276,146,00).

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp42,148,176,484,00

dikurangi Defisit-LO sebesar (Rp 42,767,276,146,00) dikurangi koreksi lain-lain sebesar (Rp 26,797,315,637,00), ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 34,509,445,572,00 dan Penurunan Ekuitas sebesar (Rp 35,056,921,011,00) sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp 7,091,255,473,00.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Semester II Tahun 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

LAPORAN KEUANGAN

BADAN PENGAWAS PEMILU PROV.KEPRI AUDITED TINGKAT UAPPA-W

TAHUN 2025

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN WILAYAH BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU

WILAYAH BAWASLU PROVINSI KEPRI LAPORAN REALISASI ANGGARAN PER 31 DESEMBER DAN 2025

(dalam Rupiah)

URAIAN	Ref	TA 2025		% thd Angg	TA 2024
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	0	19,988,340,00	0	179,408,136,00
JUMLAH PENDAPATAN		0	19,988,340,00	0	179,408,136,00
BELANJA					
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.2	18,411,790,000,00	16,697,055,898,00	90,69	10,021,933,878,00
Belanja Barang	B.3	24,641,773,000,00	23,413,031,780,00	95,01	156,141,844,450,00
Jumlah Belanja Operasi		43,053,563,000,00	40,110,087,678,00	185,7	166,163,778,328,00
Belanja Modal					
Belanja Modal	B.4	2,019,500,000,00	2,014,474,461,00	99,75	4,343,088,000,00
Jumlah Belanja Modal		2,019,500,000,00	2,014,474,461,00	99,75	4,343,088,000,00
JUMLAH BELANJA		45,073,063,000,00	42,124,562,139,00	93,46	170,506,866,328,00

II. NERACA**NERACA WILAYAH BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU****WILAYAH BAWASLU PROVINSI KEPRI****NERACA****PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(dalam rupiah)

URAIAN	Ref	2025	2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	0,00	0,00
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2	0,00	36,222,751,196,00
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)		0,00	1,279,625,433,00
Persediaan		0,00	0,00
Jumlah Aset Lancar		0,00	37,502,376,629,00
ASET TETAP			
Tanah	C.3	32,642,899,00	32,642,899,00
Peralatan dan Mesin	C.4	18,363,327,047,00	14,641,697,287,00
Gedung dan Bangunan	C.5	161,218,481,00	161,218,481,00
Akumulasi Penyusutan	C.6	(11,451,915,399,00)	(10,151,666,478,00)
Jumlah Aset Tetap		7,105,273,028,00	4,683,892,189,00
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.7	77,200,000,00	77,200,000,00
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.8	160,241,816,00	0,00
Aset Lain-Lain	C.9	194,472,701,00	0,00
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.10	(194,472,701,00)	(77,200,000,00)
Jumlah Aset Lainnya		160,241,816,00	0,00
JUMLAH ASET		7,265,514,844,00	42,186,268,818,00
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.11	174,259,371,00	38,092,334,00
JUMLAH KEWAJIBAN		174,259,371,00	38,092,334,00
EKUITAS			
Ekuitas	C.13	7,091,255,473,00	42,148,176,484,00
JUMLAH EKUITAS		7,091,255,473,00	42,148,176,484,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		7,265,514,844,00	42,186,268,818,00

III. LAPORAN OPERASIONAL**LAPORAN OPERASIONAL WILAYAH BAWASLU PROVINSI
KEPULAUAN RIAU****WILAYAH BAWASLU PROVINSI KEPRI
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(dalam rupiah)

URAIAN	Ref	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	0,00	435,313,00
JUMLAH PENDAPATAN		0,00	435,313,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	16,687,244,294,00	10,040,756,895,00
Beban Persediaan	D.3	0,00	205,215,000,00
Beban Barang dan Jasa	D.4	12,188,628,690,00	72,563,145,367,00
Beban Pemeliharaan	D.5	517,187,882,00	1,416,227,047,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6	11,972,577,466,00	80,947,989,916,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	1,417,718,882,00	1,090,976,997,00
JUMLAH BEBAN		42,783,357,154,00	166,264,311,222,00
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(42,783,357,154,00)	(166,263,875,909,00)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.8	2,568,000,00	6.520.000,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.9	0,00	0,00
Jumlah Surplus (defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		2,568,000,00	6.520.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00
Jumlah Surplus (defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00

URAIAN	Ref	2025	2024
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		13,513,008,00	172,452,823,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		13,513,008,00	172,452,823,00
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		16,081,008,00	178,972,823,00
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(42,767,276,146,00)	(166,084,903,086,00)
POS LUAR BIASA	D.9	0	0
SURPLUS/DEFISIT LO		(42,767,276,146,00)	(166,084,903,086,00)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS WILAYAH BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU

WILAYAH BAWASLU PROVINSI KEPRI LAPORAN EKUITAS PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

URAIAN	Ref	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	42,148,176,484,00	42,645,220,914,00
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(42,767,276,146,00)	(166,084,903,086,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI / KESALAHAN MENDASAR		0	0
KOREKSI YANG MENAMBAH / MENGURANGI EKUITAS	E.3	(26,799,090,437,00)	10,680,000,00
Penyesuaian Nilai Aset			
Koreksi Nilai Persediaan			
Koreksi atas Reklasifikasi	E.3.1	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap		0	0
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.3.2	(1,774,800,00)	10,680,000,00
Koreksi Lain-Lain	E.3.3	(26,797,315,637,00)	0,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	34,509,445,572,00	165,577,178,656
Ditagihkan ke Entitas Lain	E.4.1	32,703,033,912,00	88,596,851,192,00
Diterima dari Entitas Lain	E.4.2	(19,988,340,00)	(179,408,136,00)
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung		0,00	0,00
Pengesahan Hibah Langsung	E.4.3	1,826,400,000,00	77,052,042,600,00
Transfer Masuk		44,434,700,00	994,257,714,00
Transfer Keluar		(44,434,700,00)	886,564,714,00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5	(35,056,921,011,00)	(497,044,430,00)
EKUITAS AKHIR	E.6	7,091,255,473,00	42,148,176,484,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah pada Pemerintah Pusat.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah.
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat.
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga.
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .
 18. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0517/BAWASLU/SJ/KU.02/XII/2020 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1452).
 20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1452).
 21. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-115.01.2.686239/2024 Tanggal 30 November 2024.
 22. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan S-133/WPB.05/2026 tanggal 07 April 2026 tentang Pelaksanaan Koreksi Data/Transaksi dan Penyampaian LK UAPPA-W dan LK BLU Tahun 2025 Audited Lingkup Provinsi Kepulauan Riau.

A.2 Profil dan Kebijakan Teknis Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rencana Strategis Bawaslu

Bawaslu ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Pasal 70 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 89 bahwa Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu.

Visi Bawaslu

“Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya”.

Penjelasan Visi:

Penyelenggaraan Pemilu merupakan kerja bersama seluruh komponen bangsa. Keberhasilan atau kegagalan Pemilu, banyak ditentukan oleh banyak faktor dan aktor. Oleh karena itu, Bawaslu bertekad untuk menjadi aktor yang mensinergikan seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas. Proses penyelenggaraan Pemilu khususnya pencegahan dan pengawasan harus melibatkan seluruh elemen bangsa, baik dari unsur masyarakat maupun pemangku kepentingan (*stakeholders*) Pemilu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan Pemilu di semua tahapan Pemilu, dimana tujuan akhirnya adalah Bawaslu dapat berkembang menjadi lembaga yang paling dipercaya dan diandalkan oleh rakyat Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata **tepercaya**, adalah sebagai berikut:

Tepercaya:

Melakukan pengawasan, penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa Pemilu secara profesional, berintegritas, netral, transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sesuai dengan asas dan prinsip umum penyelenggaraan Pemilu demokratis, sehingga menumbuhkan legitimasi hukum serta moral politik dari publik.

Misi Bawaslu

Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun Misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama periode 2020-2024. Adapun Misi Bawaslu adalah:

1. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;
3. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;

4. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih.

Tujuan Bawaslu

Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Bawaslu, maka tujuan yang ditetapkan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektifitas kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas dan efektifitas kegiatan penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
3. Mewujudkan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

Adapun sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai pada periode 2025-2029 adalah:

1. Penguatan Pengawasan Pemilu melalui pencegahan, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang akuntabel dan efektif. Adapun strategi dalam peningkatan kualitas Pengawasan diantaranya dengan cara:
 - a. Mengidentifikasi dan memperhatikan titik kerawanan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan
 - b. Kepekaan (sensitivity) dan responsivitas Pengawas Pemilu dalam mendeteksi potensi pelanggaran dan sengketa secara dini guna meminimalisir pelanggaran/sengketa.
 - c. Keahlian dan ketegasan pengawas Pemilu dalam menangani pelanggaran maupun sengketa proses Pemilu.
 - d. Penegakkan hukum Pemilu dilakukan secara berkeadilan terbebas dari intervensi dan kepentingan politis.

- e. Melakukan proses penegakan hukum Pemilu secara cermat dan tepat guna mengkualifikasi dan menentukan terpenuhinya unsur-unsur pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pelibatan seluas-luasnya partisipasi publik dan pemangku kepentingan dalam Pengawasan Pemilu partisipatif.
3. Meningkatkan profesionalisme Pengawas Pemilu serta tata kelola hukum dalam melaksanakan fungsi Pengawasan Pemilu diantaranya dengan cara :
 - a. Penyusunan Produk Hukum yang memberikan kepastian hukum dan jelas dalam setiap putusan baik pada penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - b. Penguatan jajaran Pengawas Pemilu melalui Koordinasi, Konsolidasi, dan Konsultasi.
 - c. Memberikan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan bagi SDM Pengawas Pemilu dan SDM Aparatur Kesekretariatan.
 - d. Rekrutmen Pengawas Pemilu diselenggarakan secara profesional dan berintegritas sehingga diperoleh sumber daya manusia yang berkapasitas handal
4. Penguatan tata kelola birokrasi Pengawas Pemilu yang profesional, responsif dan akuntabel. Diantaranya dengan:
 - a. Melakukan pembinaan dan mengorganisir jenjang karir sumber daya manusia.
 - b. Menerapkan sistem reward dan punishment terhadap kinerja pegawai.
 - c. Mendorong kontribusi dalam penuangan ide-ide sebagai upaya perbaikan pada setiap lini unit kerja secara inovatif dan aspiratif.
 - d. Perbaikan sistem penyelenggaraan organisasi melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang adaptif dan aksesibel.
5. Pemanfaatan teknologi informasi guna mewujudkan Pengawasan Pemilu yang aksesibel, transparan, dan kredibel diantaranya dengan cara:
 - a. Mengembangkan sistem informasi, kualitas data dan informasi kinerja kelembagaan yang terintegrasi.
 - b. Meningkatkan layanan publik dengan pemanfaatan jaringan teknologi.
 - c. Kompilasi arsip data melalui digitalisasi.

Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 3 (Tiga) satuan kerja, yaitu:

No	Kode Satker	Nama Satker	Kewenangan
1	686239	Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	KD
2	419772	Sekretariat Bawaslu Kota Tanjungpinang	KD

No	Kode Satker	Nama Satker	Kewenangan
3	686115	Sekretariat Bawaslu Kota Batam	KD

Struktur Organisasi

Sesuai dengan Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau membawahi 3 kepala bagian dan kelompok jabatan fungsional, yaitu :

- a) Kepala Bagian Administrasi;
- b) Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat;
- c) Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum;
- d) Kelompok Jabatan Fungsional.

A.3 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Bawaslu Provinsi Kepri Semester II Tahun 2025 ini merupakan laporan kementerian yang dikelola oleh Bawaslu Provinsi Kepri. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan Bawaslu Provinsi Kepri per 30 Desember Tahun 2025 ini merupakan laporan tingkat Kementerian Negara/Lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

SAI terdiri dari Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Modul GLP dan Pelaporan. SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) modul Aset adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara, serta laporan manajerial lainnya.

A.4 Basis Akuntansi

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kepri menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5 Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepri dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6 Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester II Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Bawaslu mengacu pada kebijakan akuntansi Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Kementerian Keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kepri adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan- LRA

- a. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- b. Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- c. Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

2. Pendapatan- LO

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- c. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

3. Belanja

- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- b. Berdasarkan klasifikasi ekonomi, maka belanja dibagi menjadi 3 jenis, yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal.
- c. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- d. Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk pengeluaran dari Kas Negara (SPM/SP2D) atau pengesahan oleh Bendahara Umum Negara (SPHL/SP3HL).
- e. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- f. Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- g. Belanja disajikan dalam LRA dan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4. Beban

- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang, atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- b. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- c. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- 1) Kas dan Setara Kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan Bawaslu Provinsi Kepri. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan. Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya. Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. Kas dan Setara Kas disajikan dalam Neraca dan diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 2) Piutang adalah jumlah uang yang akan diterima oleh pemerintah dan/atau hak pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian, kewenangan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah, yang diharapkan diterima pemerintah dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
- 3) Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat

peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

- 4) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Perhitungan Penyisihan Piutang tak Tertagih

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,50%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- 5) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- 6) Piutang disajikan pada pos aset lancar di neraca menurut jenis-jenis piutang dan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Khusus untuk putusan pengadilan yang menyatakan bahwa uang pengganti perkara tindak pidana korupsi harus disetorkan selain ke kas negara (kas daerah/BUMN/BUMD) maka tagihan uang pengganti tersebut tidak disajikan pada pos aset lancar di neraca, tetapi diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Aset Tetap

- 1) Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

- 2) Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- 3) Untuk barang-barang yang memenuhi kriteria aset tetap walaupun dibeli dari MAK yang bukan peruntukannya, maka barang-barang tersebut tetap dibukukan sesuai dengan substansinya (substance over form).
- 4) Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- 5) Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- 1) Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- 2) Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a) Tanah;
 - b) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
- 3) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- 4) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- 5) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- 6) Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 295/KMK.06/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- 1) Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- 2) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- 1) Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain Aset Lancar, Aset Tetap, dan Piutang Jangka Panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- 2) Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto, yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- 3) Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas, dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas, tidak dilakukan amortisasi.
- 4) Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku, yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

6. Kewajiban

- a. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- b. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

1) Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga,

Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

2) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

- c. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

7. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Bawaslu Provinsi Kepri telah mengadakan 12 (Dua Belas) kali revisi dan Satker Bawaslu Kota Tanjungpinang tidak ada revisi selama tahun berjalan. Daftar I isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pimpinan lembaga terkait pelaksanaan tahapan pengawasan pemilihan umum dan pemilihan tahun 2025. Rincian revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal adalah sebagai berikut :

Tabel 4
Daftar DIPA Awal dan DIPA Revisi Tahun 2025

Revisi Ke-	Tanggal Revisi	Pagu Sebelum Revisi	Pagu Setelah Revisi	Alasan Revisi
0	29-Nov-24	27.720.498.000,00	27.720.498.000,00	-
1	24-Feb-25	27.720.498.000,00	16.365.719.000,00	Pemutakhiran POK dan Hal III DIPA
2	11-Mar-25	16.365.719.000,00	49.036.812.000,00	Pemutakhiran POK dan Hal III DIPA
3	23-Apr-25	49.036.812.000	49.036.812.000,00	Pemutakhiran POK dan Hal III DIPA
4	10-Jul-25	49.036.812.000,00	55.396.735.000,00	Pemutakhiran POK dan Hal III DIPA
5	14-Jul-25	55.396.735.000,00	31.479.559.000,00	Pemutakhiran POK dan Hal III DIPA
6	26-Ags-25	31.479.559.000,00	31.479.559.000,00	Pemutakhiran POK dan Hal III DIPA
7	03-Okt-25	31.479.559.000,00	31.978.351.000,00	Pemutakhiran POK dan Hal III DIPA
8	15-Okt-25	31.978.351.000,00	31.978.351.000,00	Pemutakhiran POK dan Hal III DIPA
9	27-Nov 25	31.978.351.000,00	31.978.351.000,00	Pemutakhiran POK dan Hal III DIPA
10	05-Nov 25	31.978.351.000,00	39.902.229.000,00	Pemutakhiran POK dan Hal III DIPA
11	24-Nov 25	39.902.229.000,00	39.902.229.000,00	Pemutakhiran POK dan Hal III DIPA
12	27 Des 2024	39.902.229.000,00	39.902.229.000,00	Pemutakhiran POK dan Hal III DIPA

Untuk Satker Bawaslu Kota Batam telah mengadakan 2 (Dua) kali revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pimpinan lembaga terkait pelaksanaan tahapan pengawasan pemilihan umum tahun 2025. Diantaranya penambahan pagu anggaran untuk Program Dukungan Manajemen. Rincian revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Daftar DIPA Awal dan DIPA Revisi Tahun 2025

Revisi Ke-	Tanggal Revisi	Pagu Sebelum Revisi	Pagu Setelah Revisi	Alasan Revisi
0 (Awal)	02 Desember 2025	224.678.000,00	224.678.000,00	-
1 (DJA)	03 November 2025	224.678.000,00	1.076.088.000,00	Optimalisasi penggunaan anggaran melalui Revisi POK, Penambahan Belanja Modal, dan Pencantuman /Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA
2 (KANWIL)	12 Desember 2025	1.076.088.000,00	1.076.088.000,00	Pemutakhiran data hasil revisi POK, Pencantuman /Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2025 sebesar Rp 19,988,340,00 merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak Bawaslu Provinsi Kepri yang diperoleh dari:

1. Penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu sebesar Rp 13,513,000,00 merupakan Setoran Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5
Rincian Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL

No	Nama Satuan Kerja	NTPN	Tanggal	Jumlah (Rp)
1	SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU	8D06548VVO12E1AQ	22-April-25	2,500,000,00
2	SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU	E2A186U8F7EQK5FE	06-Jan-25	2,455,000,00

No	Nama Satuan Kerja	NTPN	Tanggal	Jumlah (Rp)
3	SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU	2D29B0NA0DE3P588	06-Jan-25	8,558,000,00
4	SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU	29F6755DFIDJ02MQ	25-Feb-25	3.907.332,00
Total				17.420.332,00

2. Penerimaan pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin sebesar Rp 2,568,000 oleh Satker Tanjungpinang.
3. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp 8 merupakan potongan lain-lain pada Satker Bawaslu Tanjungpinang SPM Kekurangan Gaji Pegawai Tahun 2025 dengan nomor SP2D 259991310503576 Tanggal 25 Agustus 2025

Selanjutnya realisasi pendapatan sampai dengan 31 Desember 2025 dibandingkan dengan 31 Desember 2024 terdapat peningkatan sebesar 90,29% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6
Perbandingan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi		% Naik (Turun)
	2025 (Rp)	2024 (Rp)	
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	17,420,332,00	179,408,136,00	(90,29)
Total	17,420,332,00	179,408,136,00	(90,29)

B.2 Belanja

Realisasi Belanja Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepri sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 45,073,063,000,00 atau 93,46 persen dari anggaran belanja sebesar Rp 42,124,562,139,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2025 tersaji sebagai berikut:

Tabel 7
Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2025

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Pegawai	18,411,790,000,00	16,697,055,898,00	90,69
Belanja Barang	24,641,773,000,00	23,413,031,780,00	95,01
Belanja Modal	2,019,500,000,00	2,014,474,461,00	99,75
Total Belanja Kotor	45,073,063,000,00	42,124,562,139,00	93,46
Pengembalian Belanja	0,00	(231,320,771,00)	0,00
Total Belanja Bersih	45,073,063,000,00	41,893,241,368,00	76,89

Realisasi belanja berdasarkan program sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 8
Realisasi Belanja Berdasarkan Program

Program	2025		%
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Program Dukungan Manajemen	35,219,899,000,00	32,548,310,851,00	92,41
Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi-Pemilihan Umum	431,592,000,00	386,043,832,00	89,45
Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi-Pemilihan	9,421,572,000,00	9,421,528,227,00	100
Total	45,073,063,000,00	42,355,882,910,00	93,97

Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar 93,97% persen dibandingkan dengan 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Adanya Efisiensi anggaran

Tabel 9
Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi		% Naik (Turun)
	2025 (Rp)	2024 (Rp)	
Belanja Pegawai	16,697,055,898,00	10,021,933,878,00	66,61
Belanja Barang	23,413,031,780,00	156,141,844,450,00	(85,01)
Belanja Modal	2,014,474,461,00	4,343,088,000,00	(53,62)
Total Belanja Kotor	42,124,562,139,00	170,506,866,328,00	(75,29)
Pengembalian	(231,320,771,00)	(3,377,453,318,00)	(93,15)
Jumlah	41,893,241,368,00	167,129,413,010,00	(74,93)

Rekapitulasi belanja negara sebesar Rp 41,893,241,368,00 merupakan hasil pengurangan dari realisasi belanja bruto sebesar Rp 42,124,562,139,00 dikurangi pengembalian belanja sebesar (Rp 231,320,771,00).

Pengembalian belanja sebesar (Rp 231,320,771,00) merupakan pengembalian belanja tahun anggaran berjalan yang berasal dari Belanja Pegawai Rp 2,425,031,00 Belanja Barang Rp 228,895,740,00 dan Belanja Modal Rp 0.

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepri sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 16,697,055,898,00 atau 90.69 persen dari anggaran belanja pegawai sebesar Rp 18,411,790,000,00

Rincian anggaran dan realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2025 tersaji sebagai berikut:

Tabel 10
Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2025

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2,608,948,000,00	2,027,819,360,00	57,77
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	4,797,373,000,00	4,660,935,150,00	97,16
Belanja Lembur	655,857,000,00	322,614,000,00	53,24
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	4,910,739,000,00	4,475,366,928,00	61,72
Beban Tunj. Khusus & Beban Pegawai Transito	5,438,873,000,00	5,212,745,491,00	95,22
Jumlah Belanja Kotor	18,411,790,000,00	16,699,480,929,00	63,27
Pengembalian Belanja Pegawai		(2,425,031,00)	
Total	18,411,790,000,00	16,697,055,898	90,69

Tabel 11
Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi		% Naik (Turun)
	2025 (Rp)	2024 (Rp)	
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2,027,819,360,00	1,381,001,290,00	46,84
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	4,660,935,150,00	4,709,047,154,00	(1,02)
Belanja Lembur	322,614,000,00	134,750,000,00	139,42
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	4,475,366,928,00	1,310,151,333,00	241,59
Beban Tunj. Khusus & Beban Pegawai Transito	5,212,745,491,00	2,486,984,101,00	109,60
Jumlah Belanja Kotor	16,699,480,929,00	10,021,933,878,00	66,63
Pengembalian Belanja Pegawai	(2,425,031,00)	(3.428.811,00)	(29,27)
Total	16,697,055,898,00	10,018,505,067,00	66,66

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 16,697,055,898,00 dan Rp 10,018,505,067,00 terjadi kenaikan sebesar 66,66 % dikarenakan:

1. Terdapat penambahan pegawai ASN berupa CPNS dan PPPK di Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau.

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 sebesar Rp 16,697,055,898,00 seluruhnya berasal dari APBN yang dipergunakan untuk:

1. Pembayaran gaji CPNS, PNS, PPPK serta uang makan CPNS, PNS, PPPK bulan Januari s.d. Desember 2025;
2. Pembayaran Tunjangan struktural bulan Januari s.d. Desember 2025;
3. Pembayaran Tunjangan Fungsional PNS bulan Januari s.d Desember 2025;

4. Pembayaran uang lembur dan uang makan lembur PNS, CPNS dan PPPK di Bawaslu Provinsi untuk bulan Januari s.d Desember 2025;
5. Belanja Uang kehormatan Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kepri dan Bawaslu Kabupaten/Kota bulan Januari s.d Desember 2025;
6. Belanja Tunjangan kinerja PNS Bawaslu bulan Januari s.d. Desember 2025;
7. Belanja THR dan Gaji ke-13 PNS Tahun 2025;
8. Pembayaran THR dan Gaji ke-13 Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kepri dan Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2025.

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 sebesar Rp 16.697.055.898,00 merupakan hasil pengurangan dari Realisasi Belanja Pegawai Bruto sebesar Rp 16.699.480.929,00 dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp 2,425,031,00. Adapun rician pengembalian belanja sebagai berikut:

Tabel 12
Pengembalian Belanja Pegawai per 31 Desember 2025

No	Kode	Uraian	Jumlah (Rp)
1	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	431,00
2	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	540,000,00
3	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	555,000,00
4	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	744,390,00
5	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	150,690,00
6	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	434,520
Total			2,425,031,00

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Badan Pengawas Pemilu sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 23,413,031,780,00 atau 95,01 persen dari anggaran belanja barang sebesar Rp 24,641,773,000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja barang per 31 Desember 2025 tersaji sebagai berikut:

Tabel 13
Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2025

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Barang Operasional	4,199,090,000,00	3,941,240,619,00	6,54
Belanja Barang Non Operasional	2,797,350,000,00	2,699,869,253,00	3,61
Belanja Persediaan	17,825,000,00	0,00	0

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Jasa	4,551,331,000,00	4,298,578,658,00	5,88
Belanja Pemeliharaan	613,794,000,00	517,187,882,00	18,68
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	12,462,383,000,00	12,185,051,108,00	2,28
Jumlah Belanja Kotor	24,641,773,000,00	23,641,927,520,00	4,23
Pengembalian Belanja	-	(228,895,740,00)	0
Total	24,641,773,000,00	23,413,031,780,00	5,25

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2025 dan 30 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 23,413,031,780,00 dan Rp 24,641,773,000,00.

Tabel 14
Perbandingan Belanja Barang Per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi		% Naik (Turun)
	2025 (Rp)	2024 (Rp)	
Belanja Barang Operasional	3,941,240,619,00	7,839,243,890,00	(49,72)
Belanja Barang Non Operasional	2,699,869,253,00	44,476,767,847,00	(93,93)
Belanja Persediaan	0,00	20,536,000,00	0
Belanja Jasa	4,298,578,658,00	21,308,002,418,00	(79,83)
Belanja Pemeliharaan	517,187,882,00	1,416,227,047,00	(63,48)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	12,185,051,108,00	81,081,067,248,00	(84,97)
Jumlah Belanja Kotor	23,641,927,520,00	156,141,844,450,00	(84,86)
Pengembalian Belanja	(228,895,740,00)	(3,377,229,747,00)	(93,22)
Total	23,413,031,780,00	152,764,614,703,00	(84,67)

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 84,67 persen dari Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2024, disebabkan oleh :

1. Adanya efisiensi anggaran
2. Karna berakhirnya tahapan Pilkada

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2025 sebesar Rp 13,991,564,533,00 bersumber dari rupiah murni (RM) dipergunakan untuk :

1. Belanja Barang Operasional digunakan untuk
 - a. Belanja keperluan Perkantoran yang digunakan untuk Honorarium PPNPNS, Honorarium Korsek dan Staf PNS Kabupaten/Kota, Jamuan Tamu, Pembayaran langganan Internet, Lembur PPNPNS dan kebutuhan operasional kantor lainnya;

- b. Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat digunakan untuk keperluan pengiriman berkas dan lain-lain;
 - c. Belanja Honor Operasional Satuan Kerja yaitu digunakan untuk pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan
 - d. Belanja Barang Operasional Lainnya yang digunakan untuk belanja Pakaian Dinas; dan
2. Belanja Barang Non Operasional digunakan untuk
- a. Belanja Bahan berupa belanja ATK, Komputer supply, spanduk kegiatan, konsumsi dan snack rapat dan penggandaan untuk keperluan kegiatan;
 - b. Belanja Honor Output Kegiatan digunakan untuk honorarium Pokja pengelola website dan PPID; dan
 - c. Belanja Barang Non Operasional Lainnya digunakan untuk pencadangan anggaran.
3. Belanja Barang Persediaan dipergunakan untuk belanja barang persediaan konsumsi belanja ATK dan komputer supply untuk keperluan operasional kantor; dan
4. Belanja Jasa digunakan untuk belanja :
- a. Belanja langganan Listrik;
 - b. Belanja langganan Telepon;
 - c. Belanja langganan Air;
 - d. Belanja Sewa Gedung Kantor untuk Bawaslu Kota Tanjungpinang, Bawaslu Kab.Bintan, Bawaslu Kota Batam, Bawaslu Kab. Karimun, Bawaslu Kab. Lingga, Bawaslu Kab.Natuna, dan Bawaslu Kab. Kepulauan Anambas;
 - e. Belanja Sewa Kendaraan Operasional Sentra Gakkumdu sebanyak 1 Unit yang pada Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau;
 - f. Belanja Sewa Kendaraan Operasional dan Operasional Sentra Gakkumdu Sebanyak 7 Unit yang disebar di Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - g. Belanja Jasa Lainnya digunakan untuk keperluan jasa sosialisasi pengawasan kepada media; dan

- h. Belanja Jasa Profesi digunakan untuk belanja Narasumber Kegiatan.
- 5. Belanja Pemeliharaan dipergunakan untuk :
 - a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin adalah belanja atas perbaikan barang inventaris kantor seperti laptop dan printer, BBM Operasional Kendaraan Dinas Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/kota dan Pembayaran Pajak atas kendaraan dinas.
- 6. Belanja perjalanan dinas dalam negeri digunakan untuk :
 - a. Belanja Perjalanan Dinas Biasa digunakan untuk Perjalanan dinas dalam rangka Monitoring dan Supervisi ke Bawaslu Kabupaten; Pelaporan atau konsultasi ke Bawaslu RI dan Koordinasi dengan instansi lain;
 - b. Belanja Perjalanan Dinas dalam kota digunakan untuk monitoring dan supervisi ke Bawaslu Kota Tanjungpinang, dinas dalam rangka undangan maupun koordinasi yang berasal dari wilayah kota Tanjungpinang;
 - c. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam kota digunakan untuk belanja kegiatan yang berupa sewa hotel maupun belanja uang saku dan transport kegiatan dan undangan yang dilaksanakan di Hotel yang masih berada di wilayah Tanjungpinang; dan
 - d. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam kota digunakan untuk belanja sewa hotel untuk kegiatan, uang saku dan transport kegiatan hotel maupun undangan kegiatan Hotel yang diselenggarakan Bawaslu RI.

B.4.1 Belanja Barang (Rupiah Murni/RM)

Realisasi Belanja Barang (RM) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 13,991,564,533,00 dan Rp 74,231,829,314,00 Realisasi Belanja Barang (RM) per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 81,41 persen dari Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan karena Tahapan Pemilu dan Pilkada 2024 sudah selesai.

Tabel 15
Perbandingan Belanja Barang (RM) Per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi		% Naik (Turun)
	2025 (Rp)	2024 (Rp)	
Belanja Barang Operasional	3,889,345,359,00	7,406,604,887,00	(47,49)
Belanja Barang Non Operasional	224,245,085,00	18,859,927,561,00	(98,81)
Belanja Persediaan	0,00	20,536,000,00	(100)
Belanja Jasa	3,576,664,343,00	9,746,147,531,00	(63,30)
Belanja Pemeliharaan	504,462,882,00	1,351,727,047,00	(62,68)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	6,025,681,624,00	40,224,116,035,00	(85,02)
Jumlah Belanja Kotor	14,220,399,293,00	77,609,059,061,00	(81,68)
Pengembalian Belanja	(228,834,760,00)	(3,377,229,747,00)	(93,22)
Total	13,991,564,533,00	74,231,829,314,00	(81,15)

Realisasi belanja barang (RM) sebesar Rp 13,991,564,533,00 yang dipergunakan untuk:

1. Fasilitasi. Koordinasi. dan Pelaporan Bawaslu Provinsi dan Kab/kota;
2. Evaluasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan Bawaslu Provinsi;
3. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Bawaslu Provinsi dan Kab/kota;
4. Pembinaan dan Pengelolaan BMN Bawaslu Provinsi dan Kab/kota;
5. Pembinaan SDM Pengawas dan Kesekretariatan Bawaslu Provinsi dan Kab/kota;
6. Pengelolaan Humas. Peliputan dan Dokumentasi Bawaslu Provinsi dan Kab/kota;
7. Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Provinsi dan Kab/kota;
8. Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Bawaslu Provinsi dan Kab/kota;
9. Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan Bawaslu Provinsi dan Kab/kota;
10. Operasional dan Pemeliharaan Kantor Bawaslu Provinsi dan Kab/kota.

B.4.2 Belanja Barang (Hibah)

Realisasi Belanja Barang (Hibah) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 9,421,467,247,00 dan Rp 81,910,015,136,00. Hal ini disebabkan karena adanya Tahapan Pilkada dan pemilu sudah selesai . Adapun rincian atas belanja barang (Hibah) adalah sebagai berikut:

Tabel 16
Rincian Realisasi Belanja Barang (Hibah) Per 31 Desember 2025

Uraian	Realisasi
	2025 (Rp)
Belanja Keperluan Perkantoran	34,080,700,00
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	17,814,560,00
Belanja Bahan	460,189,919,00
Belanja Honor Output Kegiatan	1,976,522,740,00
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	38,911,509,00
Belanja Langganan Listrik	18,010,515,00
Belanja Langganan Telepon	600,000,00
Belanja Langganan Air	5,765,800,00
Belanja Sewa	592,538,000,00
Belanja Jasa Profesi	101,000,000,00
Belanja Jasa Lainnya	4,000,000,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12,725,000,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3,207,338,450,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	345,737,000,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	786,072,000,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1,820,222,034,00
Jumlah Belanja Kotor	9,421,528,227,00
Pengembalian Belanja	(60,980,00)
Total	9,421,467,247,00

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 2,014,474,461,00 atau 99,75 persen dari anggaran belanja sebesar Rp 2,019,500,000,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Tabel 15
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2025

Uraian	2025		%
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,019,500,000,00	2,014,474,461,00	99,75
Jumlah Belanja Kotor	2,019,500,000,00	2,014,474,461,00	99,75
Pengembalian Belanja	-	-	-
Total	2,019,500,000,00	2,014,474,461,00	99,75

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 2,014,474,461,00 dan Rp 4,343,088,000,00. Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2024

mengalami penurunan sebesar 53,62 persen dibandingkan realisasi per 31 Desember 2024 dan tidak terdapat pengembalian belanja.

Tabel 16
Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi		% Naik (Turun)
	2025 (Rp)	2024 (Rp)	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,014,474,461,00	4,343,088,000,00	(53,62)
Jumlah Belanja Kotor	2,014,474,461,00	4,343,088,000,00	(53,62)
Pengembalian Belanja		-	-
Total	2,014,474,461,00	4,343,088,000,00	(53,62)

B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 2,014,474,461,00 dan Rp 4,343,088,000,00. Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar 53,62 persen dibandingkan realisasi per 31 Desember 2024.

Tabel 16
**Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2025 dan 2024**

Uraian	Realisasi		% Naik (Turun)
	2025 (Rp)	2024 (Rp)	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,014,474,461,00	4,343,088,000,00	(53,62)
Jumlah Belanja Kotor	2,014,474,461,00	4,343,088,000,00	(53,62)
Pengembalian		-	-
Total	2,014,474,461,00	4,343,088,000,00	(53,62)

Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp 2,014,474,461,00 merupakan belanja modal peralatan dan mesin yang digunakan untuk pembelian :

Tabel 17
Rincian Pembelian Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025

NO	URAIAN	KUANTITAS	JUMLAH
1	Box Camera	2	2,963,700,00
2	Coffee Maker	1	1,978,000,00
3	Lensa Kamera	2	24,000,002,00
4	Camera Digital	1	14,324,653,00
5	Lampu Blitz Kamera	2	28,649,306,00
6	Note book Lenovo K14 Gen 3 Intel Ultra7 - 21KL001HID	42	1,175,989,500,00
7	Printer	15	44,988,300,00
8	Lemari Besi/Metal	2	3,000,000,00
9	Mesin Absensi	1	2,583,000,00
10	Sound System	1	85,000,000,00
11	Camera Digital	1	58,000,000,00
12	Camera Conference	1	19,500,000,00
13	Laptop Asus BG1408CVA-EB5850X	2	26,000,000,00

14	Laptop ASUS NOTEBOOK BG1409CVA I7-1355U/DDR5 8GB*2/512GB 2280 PCIE G4/14.0/VIPS/FHD (1920x1080)/WIN 11 HOME/M365 (30D) TKDN 29.88% + BMP 15%	12	226,800,000,00
15	Printer	5	18,500,000,00
16	ICE Board (Interactive Collaborative Electronic Board)	1	170,000,000,00
17	Neon Box Bawaslu Tanjungpinang	1	24,198,000,00
18	Camera Canon EOS M50 Mark II	1	15,000,000,00
19	Video Conference VC520 Pro3	1	25,000,001,00
20	Lenovo Ideapad Slim 5 14IAH10	3	47,999,999,00
	JUMLAH		2,014,474,461,00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas Dibendahara Pengeluaran

Saldo Kas dibendahara pengeluaran per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Kas dibendahara Pengeluaran merupakan kas pada Bendahara Pengeluaran yang berasal dari UP/TUP. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp 0,00 dan Rp 36.222.751.196,00.

Tabel 19
Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas 2025

No	BawasluProvinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah (Rp)
1	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0,00
2	Kas Lainnya di KL dari Hibah	0,00
Total		0,00

C.3 Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

Belanja dibayar di muka adalah pembayaran yang dilakukan sebelum barang atau jasa diterima. Saldo Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) di tahun 2025 dan tahun 2024 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 1,279,625,433.

C.4 Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp 32,642,899,00 dan Rp 32,642,899,00.

Tabel 21
Perbandingan Rincian Tanah TA 2025 dan 2024

Uraian	2025	2024
	(Rp)	(Rp)
Tanah	32,642,899,00	32,642,899,00
Total	32,642,899,00	32,642,899,00

Aset tetap berupa Tanah merupakan transfer masuk dari Pemprov Kepulauan Riau. Mutasi aset tanah dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Untuk Satker
Hibah dari Pemprov Kepulauan Riau	10.000.000,00	0,00	Satker Bawaslu Kota Tanjung pinang
Hibah dari Pemprov Kepulauan Riau	22,642,899,00	0.00	Satker Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau
TOTAL	32,642,899,00	0,00	

C.5 Peralatan Dan Mesin

Nilai aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 18,363,327,047,00 dan Rp 14,641,697,287,00. Adapun saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 22
Saldo Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2025

NO	URAIAN	KUANTITAS	JUMLAH
1	Portable Generating Set	1	34,999,800,00
2	Pompa Air	1	2,450,000,00
3	Station Wagon	6	3,610,800,000,00
4	Mini Bus (Penumpang 14 orang kebawah)	16	5,207,550,000,00
5	Sepeda Motor	2	38,397,000,00
6	Mesin Penghitung Uang	1	3,812,998,00
7	Mesin Fotocopy Double Folio	1	55,750,000,00
8	Lemari Besi/Metal	59	218,888,520,00

9	Lemari Kayu	100	296,351,000,00
10	Filing Cabinet Besi	17	54,239,880,00
11	Filing Cabinet Kayu	2	9,700,000,00
12	Brankas	7	32,157,800,00
13	Lemari Katalog	7	20,170,000,00
14	Box Camera	2	2,963,700,00
15	Tabung Pemadam Api	21	32,526,000,00
16	CCTV	10	126,136,400,00
17	Alat Penghancur Kertas	17	89,415,000,00
18	Mesin Absensi	9	67,416,000,00
19	LCD Projector/Infocus	16	125,497,401,00
20	Alat Perekam Suara(Voice Pen)	1	1,081,001,00
21	Focusing Screen/Layar LCD Projector	5	13,143,297,00
22	Alat Sidik Jari	1	7,240,000,00
23	Meja Kerja Kayu	253	767,669,970,00
24	Kursi Besi/Metal	264	452,216,000,00
25	Sice	42	253,601,000,00
26	Meja Rapat	17	164,739,400,00
27	Meja Resepsionis	9	44,820,000,00
28	Cubikal	2	140,128,535,00
29	Sofa	1	11,500,000.00
30	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	8	28,493,801,00
31	Alat Pembersih Lainnya	1	560,000,00

32	Lemari Es	16	40,035,000,00
33	A.C Split	124	668,363,386,00
34	Rak Piring Alumunium	2	6,700,000.00
35	Televisi	9	55,206,000.00
36	Sound System	14	187,424,001,00
37	Mic Conference	11	53,795,400,00
38	Camera Video	3	47,505,000,00
39	Dispenser	1	2,100,000.00
40	Lambang Instansi	2	63,198,000,00
41	Coffe Maker	1	1,978,000.00
42	Handy Cam	5	43,140,000.00
43	Tangki Air	1	4,160,000.00
44	Alat Rumah Tangga Lainnya	1	1,000,000.00
45	Audio Amplifier	1	5,900,000.00
46	Microphone/Wireless MIC	17	84,688,708,00
47	Microphone/Boom Stand	6	10,900,000,00
48	Microphone Cable	4	4,084,000,00
49	Voice Recorder	8	9,500,000,00
50	Mixer Sound Sistem	1	2,700,000,00
51	Tripod Camera	3	6,600,000,00
52	Lensa Kamera	3	31,800,002,00
53	Head Set	2	8,795,000,00
54	Camera Digital	26	352,566,653,00
55	Lampu Blitz Kamera	10	48,742,306,00

56	Video Conference	2	58,000,001,00
57	LCD Monitor	1	1,200,000,00
58	Camera Conference	8	28,110,000,00
59	Mesin Barcode	1	3,500,000,00
60	Facsimile	1	900,000,00
61	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	7	24,108,000,00
62	Unit Transceiver VHF Stationary	1	4,887,999,00
63	Alat Komunikasi Radio VHF Lainnya	2	6,536,008,00
64	Unit Antena Transceiver VHF Stationary	1	2,762,999,00
65	Clinical Thermometer	8	21,955,000,00
66	Kursi Dorong	1	1,443,000,00
67	P.C Unit	112	999,475,142,00
68	Lap Top	105	1,280,125,066,00
69	Note Book	58	1,387,727,000,00
70	Tablet PC	10	56,238,000,00
71	Printer	124	332,129,091,00
72	Scanner	29	248,928,582,00
73	External/Portable Hardisk	35	45,505,200,00
74	ICE Board (Interactive Collaborative Electronic Board	1	170,000,000,00
75	Firewall	1	34,500,000,00
76	Pagar Semi Permanen	1	161,218,481,00
77	Alat Penghancur Kertas	1	5,967,500,00
78	Mesin Absensi	1	7,600,00,00

79	Meja Kerja Kayu	2	7,800,000,00
80	Kursi Besi/Metal	4	10,650,000,00
81	Pc unit	2	10,320,000,00
82	laptop	1	5,035,000,00
83	CCTV - Camera Control Television System	6	50,828,000,00
84	Printer (Peralatan Personal Komputer)	6	13,709,200,00
85	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	1	2,676,000,00
86	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	4,930,000,00
87	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2000	10,000,000,00
88	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	5000	22,642,899,00
	TOTAL	8704	18,674,461,128,00

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 23
Mutasi Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2025

Saldo per 1 Januari 2025	Rp	14,641,697,287,00
Mutasi tambah:		
- Pembelian BMN	Rp	2,014,474,461,00
-Transfer Masuk	Rp	44,434,700,00
-Reklasifikasi Masuk	Rp	268,299,306,00
-Hibah Masuk	Rp	1,826,400,000,00
Mutasi Kurang:		
-Transfer Keluar	Rp	(44,434,700,00)
-Reklasifikasi Keluar	Rp	(268,299,306,00)

-Koreksi		
Pencatatan Nilai Berkurang	Rp	(1,972,000,00)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	Rp	(117,272,701,00)
Saldo per 31 Desember 2025	Rp	18,363,327,047,00
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025	Rp	(11,451,915,399,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	Rp	6,911,411,648,00

Penjelasan mutasi tambah yaitu :

- a. Pengadaan sebesar Rp 2,014,474,461,00 merupakan belanja modal peralatan dan mesin yang digunakan untuk pembelian :

Tabel 25
Rincian Pembelian Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025

NO	URAIAN	KUANTITAS	JUMLAH
1	Alat kantor & rumah tangga	8	119,722,700,00
2	Alat studio, komunikasi dan Pemancar	10	354,473,962,00
3	Komputer	79	354,473,962,00
	JUMLAH	97	2,014,474,461,00

Transfer Masuk sebesar Rp 44,434,700,00 terdiri dari :

Tabel 26
Rincian Transfer Masuk Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025

NO	URAIAN	KUANTITAS	JUMLAH
1	Lemari Es	1	2,320,000,00
2	Camera Conference	1	492,000,00
3	Alat Komunikasi Lainnya	1	2,676,000,00
4	Laptop	13	22,350,000,00
5	Printer	14	15,225,000,00
6	Scanner	3	1,292,500,00
	JUMLAH	33	44,434,700,00

Penjelasan mutasi keluar yaitu:

- b. Transfer Keluar sebesar (Rp 44,434,700,00) terdiri dari:

Tabel 27
Rincian Transfer Keluar Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025

NO	URAIAN	KUANTITAS	JUMLAH
1	Lemari Es	1	2,320,000,00
2	Camera Conference	1	492,000,00

3	Alat Komunikasi Lainnya	1	2,676,000,00
4	Laptop	13	22,350,000,00
5	Printer	14	15,225,000,00
6	Scanner	3	1,292,500,00
	JUMLAH	33	(44,434,700,00)

C.6 Gedung Dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan Desember 2023 adalah Rp161.218.481,00 dan Rp161.218.481,00 yang merupakan pagar semi permanen. sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 26
Rincian saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025

No.	Lokasi	Luas/Unit	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	Dompok Bukit Bestari Tanjungpinang	4.995 M ²	161.218.481,00	Tugu Tanda Batas/Pagar
Jumlah			161.218.481,00	

Mutasi atas Gedung dan Bangunan pada tahun pelaporan adalah sebagai berikut:

Mutasi atas Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2025	Rp 161.218.481,00
Mutasi tambah:	
Mutasi kurang:	
Saldo per 31 Desember 2025	Rp 161.218.481,00
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025	(Rp 17,734,035,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	Rp 143,484,446,00

C.7 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Saldo Akumulasi

Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar (Rp 11,451,915,399,00) dan (Rp 10,151,666,478,00).

Tabel 27
Perbandingan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Aset Tetap	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	(11,434,181,364,00)	(10,137,156,813,00)
2	Gedung dan Bangunan	(17,734,035,00)	(14,509,665,00)
	Total	11,451,915,399,00	(10,151,666,478,00)

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 :

Tabel 28
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	18,363,327,047,00	11,434,181,364,00	6,929,145,683,00
2	Gedung dan Bangunan	161,218,481,00	(17,734,035,00)	143,484,446,00
	Total	18,524,545,528,00	11,416,447,329,00	7,072,630,129,00

C.8 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp77.200.000,00 dan Rp77.200.000,00. Aset Tak Berwujud merupakan Software berupa Website Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Adapun rekap ATB per 31 Desember 2025 sebagai berikut :

Tabel 29
Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025

No	Uraian	Kuantitas	Jumlah (Rp)
1	Software Komputer	1	77.200.000,00
	Total	1	77.200.000,00
	Akumulasi Amortisasi		77.200.000,00
	Jumlah		0,00

Tabel 30
Rincian Aset Tak Berwujud dan Akumulasi Amortisasi

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Amortisasi	Nilai Buku
A	Aset Tak Berwujud			
1	Software Komputer	77.200.000,00	77.200.000,00	0,00
	Jumlah	77.200.000,00	77.200.000,00	0,00

C.9 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Dana yang dibatasi penggunaannya per 31 Desember 2025 adalah Rp 160,241,816,00. Dana yang dibatasi penggunaannya Per 31 desember 2025 dan 31 desember 2024 masing-masing sebesar Rp 160,241,816,00 dan Rp 0,00. Adapun rincian dana yang di batasi penggunaannya berupa SPM RPATA yang belum SP2D di tahun 2025 yaitu kontrak honor tenaga outsourcing yang berakhir di 31 Desember 2025, rinciannya dijelaskan pada table berikut.

Tabel 31
Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per tanggal 31 Desember 2025

No	satker	Tanggal BAST	Kontrak / Tagihan (jika ada)		Jumlah
			Nomor KONTRAK	Tgl SP2D	
1	Bawaslu Prov Kepri	31-DEC-25	003/SPK-PPK/BAWASLU-KR/05/2025	02-JAN-26	3,166,000.00
2	Bawaslu Prov Kepri	31-DEC-25	002/SPK-PPK/BAWASLU-KR/05/2025	02-JAN-26	3,166,000.00
3	Bawaslu Prov Kepri	31-DEC-25	005/SPK-PPK/BAWASLU-KR/07/2025	02-JAN-26	3,166,000.00
4	Bawaslu Prov Kepri	31-DEC-25	004/SPK-PPK/BAWASLU-KR/07/2025	02-JAN-26	3,166,000.00
5	Bawaslu Prov Kepri	31-DEC-25	007/SPK-PPK/BAWASLU-KR/08/2025	02-JAN-26	23,000,000.00
6	Bawaslu Prov Kepri	31-DEC-25	003/SPK-PPK/KR-04/08/2025	07-JAN-26	13,872,000.00
7	Bawaslu Prov Kepri	31-DEC-25	023/SPK-PPK/KR-03/07/2025	07-JAN-26	18,400,000.00
8	Bawaslu Prov Kepri	31-DEC-25	EP-01K1G0AWJ4TQJC7XM7QW7R36G7	07-JAN-26	4,600,000.00
9	Bawaslu Prov Kepri	31-DEC-25	EP-01K1FZRH8BJPTRS5SA92TX6WM9	07-JAN-26	4,624,000.00
10	Bawaslu Prov Kepri	31-DEC-25	EP-01K1F4JT62D8G5HZ42KECP01SR	07-JAN-26	9,248,000.00
11	Bawaslu Prov Kepri	31-DEC-25	EP-01K1F4AEZHY1CMRB57HZGY5ZF O	07-JAN-26	4,624,000.00
12	Bawaslu Prov Kepri	31-DEC-25	EP-01K1FZKDWDSFWMATR98GCSH96	07-JAN-26	4,624,000.00
13	Bawaslu Prov Kepri	31-DEC-25	EP-01K1G06YV43VFA7Y87GKEZKMFZ	07-JAN-26	9,200,000.00
14	Bawaslu Prov Kepri	31-DEC-25	007/spk-ppk/kr-07/07/2025	07-JAN-26	9,244,908.00

15	Bawaslu Prov Kepri	31-DEC-25	EP-01K87GQRZV26CHG9Z38MAVJW Q5	07-JAN-26	9,244,908.00
16	Bawaslu Prov Kepri	31-DEC-25	006/SPK-PPK/KR-04/10/2025	07-JAN-26	4,624,000.00
17	Bawaslu Prov Kepri	31-DEC-25	EP-01K8T6QVQW9AGTBZ5JJ3SMHHA 6	07-JAN-26	4,624,000.00
18	Bawaslu Prov Kepri	31-DEC-25	EP-01K8T0205B6XV8ERV85P2GGYKA	08-JAN-26	4,600,000.00
19	Bawaslu Prov Kepri	31-DEC-25	30/SPK-PPK/KR-01/10/2025	07-JAN-26	4,624,000.00
20	Bawaslu Prov Kepri	31-DEC-25	031/SPK-PPK/KR-01/10/2025	07-JAN-26	4,624,000.00
21	Bawaslu Tanjungpinang	31-DEC-25	EP-01KFVASDAGR8WWH0RN3PD96E D	05-JAN-26	13,800,000.00
JUMLAH					160,241,816.00

C.10 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp77.200.000,00 dan Rp77.200.000,00. Rincian akumulasi penyusutan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut.

Tabel 31
Perbandingan Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Aset Lainnya	2025 (Rp)	2024 (Rp)
A	Aset Tak Berwujud		
1	Software Komputer	77.200.000,00	77.200.000,00
	Jumlah	77.200.000,00	77.200.000,00
B	Aset Lain-Lain		
1	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00
	Total	77.200.000,00	77.200.000,00

Tabel 32
Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Amortisasi/ Penyusutan	Nilai Buku
A	Aset Tak Berwujud			
1	Software Komputer	77.200.000,00	77.200.000,00	0,00
	Jumlah	77.200.000,00	77.200.000,00	0,00
B	Aset Lain-Lain			
1	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00
	Total	77.200.000,00	77.200.000,00	0,00

C.11 Utang pada pihak ketiga

Nilai utang pada pihak ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp 174,259,371,00 dan Rp 38,092,334,00. Utang kepada pihak ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 bulan.

Tabel 33
Perbandingan Utang pada pihak ketiga di 2025 dan 2024

Uraian	2025	2024	Naik/Turun%
	(Rp)	(Rp)	
Utang pada pihak ketiga	174,259,371,00	38,092,334,00	457,47%
Total	174,259,371,00	38,092,334,00	

Adapun rincian utang pada pihak ketiga disajikan pada table berikut :

SATKER	AKUN	URAIAN	JUMLAH
BAWASLU PROV KEPRI	212191	RPATA	146,441,816.00
BAWASLU TANJUNG PINANG	212191	RPATA	13,800,000,00
BAWASLU KOTA BATAM	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	5,006,142,00
BAWASLU KOTA BATAM	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	6,637,083,00
BAWASLU PROV KEPRI	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	1,068,506,00
BAWASLU TANJUNG PINANG	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	225,824,00
BAWASLU PROV KEPRI	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	1,080,000,00
Total			174,259,371,00

C.12 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 7,091,255,473,00 dan Rp 42,148,176,484,00. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset senilai Rp 7,265,514,844,00 dan kewajiban senilai Rp 174,259,371,00 di tahun 2025.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**D. 1 Beban Pegawai**

Beban Pegawai untuk per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 16,964,936,065,00 dan Rp 10,040,756,895,00 mengalami kenaikan sebesar 60,17% dibandingkan tahun 2024 dikarenakan adanya pembayaran atas adanya Penambahan PPPK Tahun 2024 sebanyak 79 Orang dan adanya penambahan pembayaran gaji dan Tunjangan CPNS di Lingkungan Bawaslu Provinsi Kepri sebanyak 23 Orang.

Tabel 37
Perbandingan Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi		% Naik (Turun)
	2025 (Rp)	2024 (Rp)	
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	2,031,166,995.00	1,384,275,307.00	68,15%
Beban Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	4,660,935,150.00	4,709,047,154.00	101,03%
Beban Uang Lembur	322,614,000.00	134,750,000.00	41,71%
Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	4,753,023,429,00	1,310,151,333.00	27,56%
Beban Tunj. Khusus & Beban Pegawai Transito	5,197,196,491.00	2,502,533,101.00	48,15%
Total	16,964,936,065.00	10,040,756,895.00	59,19%

Terdapat selisih beban pegawai antara Laporan Realisasi Anggaran dengan Laporan Operasional sebesar Rp 9,811,604,00 merupakan Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar Rp 9,011,413,00 dan Jurnal Balik Belanja Pegawai yang masih harus dibayar TAYL Rp 18,823,017.00.

Beban pegawai per 31 Desember 2025 merupakan beban yang diperoleh dari hasil Mutasi sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2025	Rp	0,00
Mutasi Tambah:		
- Belanja Pegawai (LRA)	Rp	16,697,055,898.00
- Belanja Pegawai YMHD	Rp	9,011,413.00
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	16,706,067,311,00
Mutasi Kurang:		
- Jurnal Balik Belanja Pegawai yang masih harus dibayar TAYL	Rp	18,823,017.00
Jumlah Mutasi Kurang	Rp	(18,823,017.00)

Jumlah Beban Pegawai per 31 Desember 2025	Rp	16,687,244,294,00
--	-----------	--------------------------

Mutasi Tambah merupakan Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar (YMHD) Tahun Anggaran Berjalan 2025. Adapun rincian atas belanja pegawai yang masih harus dibayar sebesar Rp 9,011,413.00 dari Satker Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp 2,148,506.00, Satker Bawaslu Kota Tanjungpinang Rp 225,824.00, dan Satker Sekretariat Bawaslu Kota Batam Rp 6,637,083.00. Adapun rinciannya disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 37
Jurnal Belanja Pegawai yang masih harus dibayar per 31 Desember 2025
Satker Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau

No	Uraian	No SPP	Nominal SPP
1	Pembayaran Belanja Kekurangan Gaji Pokok PPPK	511611	986,400.00
2	Pembayaran Belanja Kekurangan Tunj.Istri/Suami PPPK	511621	58,320.00
3	Pembayaran Belanja Kekurangan Tunj. Anak PPPK	511622	23,328.00
4	Pembayaran Belanja Kekurangan Pembulatan PPPK	511619	458.00
5	Pembayaran Belanja Kekurangan Tunjangan Jabatan PNS	511124	1,080,000.00
Total			2,148,506.00

Tabel 37
Belanja Pegawai yang masih harus dibayar per 31 Desember 2025
Satker Bawaslu Kota Batam

No	Uraian	Kd Akun	Nominal SPP
1	Pembayaran Belanja Kekurangan Gaji Pokok PNS	511111	5.554.200.00
2	Pembayaran Belanja Kekurangan Tunj.Istri/Suami	511121	555.420.00
3	Pembayaran Belanja Kekurangan Tunj. Anak	511122	111.084.00
4	Pembayaran Belanja Kekurangan Tunj. Pajak	511125	416.137.00
5	Pembayaran Belanja Kekurangan Pembulatan	511119	242.00
Total			6,637,083.00

D. 2 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 12,206,580,788.00 dan Rp 72,563,145,367.00.

Tabel 38
Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	% Naik (Turun)
Beban Keperluan Perkantoran	3,455,431,819,00	6,954,348,847.00	-50,31%

Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	287,000.00	50,600.00	467,19%
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	290,812,560.00	360,924,000.00	-19,43%
Beban Barang Operasional Lainnya	191,312,523.00	521,108,400.00	-63,29%
Beban Bahan	654,630,004.00	7,864,709,157.00	-91,68%
Beban Honor Output Kegiatan	1,963,867,740.00	33,246,940,200.00	-94,09%
Beban Barang Non Operasional Lainnya	68,716,509.00	3,427,097,898.00	-97,99%
Beban Langganan Listrik	328,482,708.00	484,303,298.00	-32,17%
Beban Langganan Telepon	3,685,200.00	19,509,835.00	-81,11%
Beban Langganan Air	26,250,300.00	70,416,442.00	-62,72%
Beban Sewa	4,232,547,132.00	14,022,869,849.00	-69,82%
Beban Jasa Profesi	315,604,800.00	1,700,400,000.00	-81,44%
Beban Jasa Lainnya	674,952,493.00	3,939,791,249.00	-82,87%
Total	12,206,580,788.00	72,563,145,367.00	(83,19)

Terjadi penurunan beban barang dan jasa sebesar 83,19 persen per 31 Desember 2025 dibandingkan dengan 31 Desember 2024.

Penurunan Beban Barang dan Jasa disebabkan karena :

1. Telah selesainya tahapan Pilkada Serentak Tahun 2024;
2. Terjadinya efisiensi besar-besaran yang memangkas sejumlah belanja operasional diantaranya termasuk belanja barang dan jasa;
3. Telah selesainya kontrak sewa Gedung dan meublair di masing-masing kabupaten/kota semasa dalam mendukung tahapan Pilkada Serentak tahun 2024.

Terdapat selisih beban Barang dan Jasa antara Laporan Realisasi Anggaran dengan Laporan Operasional sebesar Rp 11,224,403,090.00 merupakan Belanja barang yang masih harus dibayar Rp 5,006,142.00 dan Jurnal Balik Beban Sewa Rp 1,279,625,433.00 dan Jurnal Balik Belanja Yang Masih Harus Dibayar TAYL Rp 17,739,317.00.

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 merupakan beban yang diperoleh dari hasil Mutasi sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2025	Rp	0
Mutasi Tambah:		
- Belanja Barang dan Jasa (LRA)	Rp	11,224,403,090.00
- Belanja Barang yang masih harus dibayar TAB	Rp	5,006,142.00

- Jurnal Balik Beban Sewa atas Sewa dibayar dimuka TAYL	Rp	1,279,625,433.00
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	12,509,034,665,00
Mutasi Kurang:		
- Jurnal Balik Belanja Barang YMHD TAYL	Rp	(17,739,317.00)
Jumlah Mutasi Kurang	Rp	(17,739,317.00)
Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025	Rp	12,491,295,348,00

Mutasi tambah berupa Belanja Barang yang Masih harus dibayar berupa Belanja barang yang masih harus dibayar TAB sebesar Rp 5,006,142.00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 39
Belanja Barang yang masih harus dibayar per 31 Desember 2025

No	Uraian	Jenis Belanja	Nominal SPM
1	Pembayaran Belanja Tagihan Listrik	522111	3.010.692,00
2	Pembayaran Belanja Tagihan Internet	522112	1.687.600,00
3	Pembayaran Belanja Tagihan Air	522113	307.850,00
Total			5,006,142.00

D. 3 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 517,187,882.00 dan Rp 1,416,227,047.00. Tidak terdapat selisih antara belanja Pemeliharaan pada LRA dan beban Pemeliharaan pada LO.

Tabel 42
Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	% Naik (Turun)
Beban Pemeliharaan	517,187,882.00	1,416,227,047.00	(63,48)

Terjadi penurunan Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 sebesar 63,48 persen dibandingkan pada 31 Desember 2024 hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran pada tahun 2025.

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 merupakan beban yang diperoleh dari hasil Mutasi sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2025	Rp	0,00
Mutasi Tambah:		
- Belanja Pemeliharaan (LRA)	Rp	517,187,882.00
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	517,187,882.00
Mutasi Kurang:		0,00
Jumlah Mutasi Kurang	Rp	0,00
Jumlah Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025	Rp	517,187,882.00

D. 4 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 12,183,521,108.00 dan Rp 80,544,320,316.00.

Tabel 43
Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	% Naik (Turun)
Beban Perjalanan Dinas Biasa	6,245,623,707.00	10,896,742,450.00	-42,68%
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3,890,109,221.00	18,876,199,035.00	-79,39%
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	630,395,000.00	27,369,003,655.00	-97,70%
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,417,393,180.00	23,402,375,176.00	-93,94%
Total	12,183,521,108.00	80,544,320,316.00	-84,87%

Telah berakhirnya tahapan Pemilu Serentak 2025 dapat menjadi pendorong utama terjadinya penurunan belanja perjalanan dinas sebesar 85,87 persen pada 31 Desember 2025 dibandingkan pada 31 Desember 2024. Selain itu, terjadinya efisiensi juga salah satu faktor penurunan belanja perjalanan dinas pada tahun 2025.

Terdapat selisih beban Perjalanan Dinas antara Laporan Realisasi Anggaran dengan Laporan Operasional sebesar Rp 1,530,000.00 yang merupakan Jurnal Balik Belanja YMHD TAYL. Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 merupakan beban yang diperoleh dari hasil Mutasi sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2025	Rp	0,00
Mutasi Tambah:		
- Belanja Perjalanan Dinas (LRA)	Rp	11,974,107,466.00
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	11,974,107,466.00
Mutasi Kurang:		
- Jurnal Balik Belanja Barang YMHD TAYL	Rp	1,530,000.00
Jumlah Mutasi Kurang	Rp	1,530,000.00
Jumlah Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025	Rp	11,972,577,466.00

Mutasi tambah berupa Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp 11,974,107,466.00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 44
Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025

Akun	Uraian	Nominal
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6,099,557,849.00
524113	Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota	630,235,000.00
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	1,417,393,180.00
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota	3,826,921,437.00
Total		11,974,107,466.00

D. 5 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 1,417,718,822.00 dan Rp 1,090,976,997.00. Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar 29,94 persen dibandingkan dengan 31 Desember 2024.

Tabel 45
Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	% Naik (Turun)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	3,224,370.00	3,224,370.00	-
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1,414,494,452.00	1,086,651,252.00	30,17
Total	1,417,718,822.00	1,072,838,427.00	32,14

D. 6 Pendapatan Pelepasan Aset

Pendapatan pelepasan aset untuk per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 2,568,000.00 dan Rp 6,520,000.00 atau mengalami penurunan sebesar 60,61 persen dibandingkan dengan tahun lalu. Adapun pelepasan aset tersebut berupa Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin.

Tabel 45
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin yang Dilepas

Uraian	Satker	Peralatan	Jumlah (Buah)
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	Bawaslu Kota Tanjungpinang	Laptop	6
		Kursi Besi/Metal	4
		Alat Penghancur Kertas	1
		Scanner	1
		Printer	6
		P.C. Unit	2
		Camera Digital	1
		Mesin Absensi	1
		Meja Kerja Kayu	2
Total	Buah		24
Total	Nominal		2,568,000.00

D. 7 Kegiatan Non Operasional

Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 13,513,000.00 dan Rp 172,452,823.00.

Tabel 46
Perbandingan Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Satker	2025 (Rp)	2024 (Rp)	% Naik (Turun)
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	Bawaslu Prov. Kepri	13,513,000.00	172,452,823.00	(92,164)
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	Bawaslu Kota Tanjungpinang	8.00	0	0
Total		13,513,000.00	172,452,823.00	(92,164)

Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL per 31 Desember 2025 sebesar Rp 13,513,008.00 yang merupakan Penyetoran pengembalian Belanja TAYL sebesar Rp 13,513,008.00 dengan rincian penerimaan sebagai berikut.

Tabel 47
Rincian Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL

Uraian	NTPN	NTB	ID Billing/No Dokumen	Unit Penyetor	Nominal
Penerimaan Kembali Beban Barang TAYL	2D29B0NA 0DE3P588	25010602100 2	82025010669 6968	Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	8,558,000,00
Penerimaan Kembali Beban Barang TAYL	E2A186U8 F7EQK5FE	25010602106 7	82025010669 7198	Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	2,455,000,00
Penerimaan Kembali Beban Barang TAYL	8D06548V VO12E1AQ	25042202018 8	82025042234 7098	Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	2,500,000,00
Pembulatan Gaji Induk Pegawai	-	-	..	Bawaslu Kota Tanjungpinang	8,00
Total					13,513,008.00

D. 8 Surplus/Defisit LO

Defisit LO untuk per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp (42,767,276,146.00) dan Rp (166,084,903,086.00)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 42,148,176,484,00 dan Rp 42,645,220,914,00.

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah defisit sebesar (Rp 42,767,276,146,00) dan (Rp 166,084,903,086,00). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Nilai Koreksi pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing (Rp 26,799,090,437,00) dan Rp 10,680,000,00.

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 34,509,445,572,00 dan Rp 165,577,178,656,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Tabel 50
Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Ditagikan ke Entitas Lain	32,703,033,912,00	88,596,851,192,00
Diterima dari Entitas Lain	(19,988,340,00)	(179,408,136,00)
Pengesahan Hibah Langsung	1,826,400,000,00	77,052,042,600,00
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung TAYL	0,00	0,00
Pengesahan Hibah Langsung TAYL	0,00	0,00
Transfer Keluar	(44,434,700,00)	(886,564,714,00)
Transfer Masuk	44,434,700,00	994,257,714,00
Jumlah	34,509,445,572,00	165,577,178,656,00

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2025, DDEL sebesar Rp 19,988,340,00 merupakan pendapatan PNPB tahun 2025, terdiri dari:

Tabel 51
Diterima dari Entitas Lain (DDEL)

Diterima dari Entitas lain	Jumlah (Rp)
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	8,00
Penjualan Peralatan dan Mesin	2,568,000,00
Pendapatan Jasa Giro	0,00
Total	2,568,008,00

Sedangkan DKEL sebesar Rp 32,703,033,912,00 merupakan belanja netto yang berasal dari anggaran rupiah murni, terdiri dari :

Tabel 52
Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Ditagihkan ke Entitas lain	Jumlah (Rp)
Belanja Pegawai	16,697,055,898,00
Belanja Barang	23,413,031,780,00
Belanja Modal	2,014,474,461,00
Jumlah Kotor	42.124.562.139,00
Pengembalian Belanja Pegawai	2,425,031,00
Pengembalian Belanja Barang	228,895,740,00
Jumlah	42.355.882.910,00

2. Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Dalam Negeri

Sepanjang tahun 2025 terdapat pengesahan hibah langsung dalam negeri sebesar Rp 1,826,400,000,00 yang terdiri atas Pengesahan Penerimaan Hibah Langsung Dalam Negeri Barang pada tahun 2025 sesuai Perjanjian Hibah Nomor 200.1.1/02/IX/2025 tanggal 26 September 2025 berupa Kendaraan.

E.5 Kenaikan dan Penurunan Ekuitas

Penurunan Ekuitas per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar (Rp 35,056,921,011,00) dan Penurunan Ekuitas pada tahun 2024 adalah sebesar (Rp 497,044,430,00).

Tabel 53
Penurunan Ekuitas

Kenaikan/Penurunan Ekuitas	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Surplus/Defisit LO	(42,767,276,146,00)	(166,084,903,086,00)
Transaksi Antar Entitas	34,509,445,572,00	165,577,178,656,00
Jumlah	(8,257,830,574,00)	(507,724,430,00)

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 7,091,255,473,00 dan Rp 42,148,176,484,00.

Nilai ekuitas akhir merupakan akumulasi nilai ekuitas awal sebesar Rp 42,148,176,484,00 dikurang penurunan ekuitas sebesar (Rp 35,056,921,011,00).

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Pengungkapan Pengembangan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Tata Kerja, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu dan mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu. Dalam menjalankan tugas Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dibantu oleh Bagian Administrasi, Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat dan Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum.

Berikut dibawah Struktur Organisasi di Bawaslu terbaru berdasarkan dengan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota,:

A. Sekretariat Bawaslu Provinsi

Sekretariat Bawaslu Provinsi terdiri atas:

- 1) Plt. Kepala Sekretariat : **Siska Ernida Wati, S.Si**
- 2) Kepala Bagian Administrasi : **Siska Ernida Wati, S.Si**
- 3) Kepala Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat :
Ridwan, S.H
- 4) Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian
Sengketa Proses Pemilu dan Hukum : **Takwin Saleh, S.H**
- 5) Bendahara Pengeluaran : **Dameria Siahaan, A.Md. Ak**

B. Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota

- a. Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bintan terdiri atas:
 - 1) Koordinator Sekretariat : **Sulistiawan, S.Sos**
 - 2) Bendahara Pengeluaran Pembantu : **Pramesti Putri Ismayadewi**
- b. Sekretariat Bawaslu Kota Batam terdiri atas:
 - 1) Kepala Sekretariat : **Esther Irianti Lombogia, S.T., M.E**
 - 2) Bendahara Pengeluaran Pembantu : **Novelysa Samosir, S.Si**
- c. Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karimun terdiri atas:
 - 1) Koordinator Sekretariat : **Azim, S.Pd.I**
 - 2) Bendahara Pengeluaran Pembantu : **Sutarman Edi**
- d. Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lingga terdiri atas:
 - 1) Koordinator Sekretariat : **Darol Kadmi**
 - 2) Bendahara Pengeluaran Pembantu : **Surrahman**
- e. Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri atas:
 - 1) Koordinator Sekretariat : **Lindawati, S.M.**
 - 2) Bendahara Pengeluaran Pembantu : **Dameria Siahaan, A.Md. Ak**
- f. Sekretariat Bawaslu Kabupaten Natuna terdiri atas:
 - 1) Koordinator Sekretariat : **Fisabillillah**
 - 2) Bendahara Pengeluaran Pembantu : **Hanapi**

F.2. Pengungkapan Lain-Lain

1. Rekening Pemerintah

Rekening Pemerintah yang masih digunakan dalam kegiatan operasional di lingkungan Bawaslu Provinsi Kepri sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebanyak 6 rekening, yang terdiri dari:

- a. Rekening Virtual Pengeluaran sejumlah 2 rekening, yang terdiri atas Rekening BPG Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dan BPG Bawaslu Kota Batam;
- b. Rekening Virtual Pengeluaran Pembantu sejumlah 4 rekening, masing-masing Kabupaten/Kota memiliki 1 rekening yang terdiri

atas Rekening BPG dan 1 Rekening Pegawai yang a.n. Yesi sebagai Staf Pengelola Keuangan di Bawaslu Anambas.

2. Pejabat Perbendaharaan

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Nomor: 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/I/2020 Tanggal 2 Januari 2020 Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penangguna Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :

Tabel 53. Pejabat Perbendaharaan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau

No.	Nama Pegawai	Jabatan
1	Siska Ernida Wati, S.Si	Kuasa Pengguna Anggaran
2	Ridwan, S.H.	Pejabat Pembuat Komitmen
3	Dwi Suharani Raja Guk Guk	Pejabat Penandatangan SPM
4	Dameria Siahaan, A.Md.Ak.	Bendahara Pengeluaran
5	Siska Ernida Wati, S.Si.	Pejabat Pembuat Komitmen Hibah
6	Dameria Siahaan, A.Md.Ak.	Bendahara Pengeluaran Pembantu Hibah

Berdasarkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Nomor: 48/KU.03/KR/07/2025 Tanggal 01 Juli 2025 tentang Perubahan Ketiga Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 6/KU.03/KR/01/2025 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se- Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025:

Tabel 54. Pejabat Perbendaharaan Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau

No.	Nama	Jabatan
1	Sulistiawan, S.Sos	Pejabat Pembuat Komitmen Kab. Bintan
	Pramesti Putri	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kab. Bintan
2	Esther Irianti Lombogia, S.T., M.E	Pejabat Pembuat Komitmen Kota Batam
	Novelysa Samosir, S.Si	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kota Batam
3	Azim, S.Pd.I.	Pejabat Pembuat Komitmen Kab. Karimun
	Sutarman Edi	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kab. Karimun
4	Darol Kadmi	Pejabat Pembuat Komitmen Kab. Lingga
	Surrahman	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kab. Lingga
5	Lindawati, S.M.	Pejabat Pembuat Komitmen Kab. Kep.Anambas
	Dameria Siahaan, A.Md.Ak	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kab. Kep.Anambas
6	Fisabilillah, S.Pd.I.	Pejabat Pembuat Komitmen Kab. Natuna
	Hanapi	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kab. Natuna

F.3. Tindak lanjut temuan BPK

Pada tahun 2025 terdapat pemeriksaan BPK pada Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau. Pada tahun 2025 seluruh pemeriksaan BPK dengan rincian:

- a. Realisasi belanja barang tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban sebesar Rp 532,885,168.00
- b. Realisasi belanja sewa gedung kantor kurang potong pajak sebesar Rp 6,191,646.19
- c. Realisasi belanja perjalanan dinas lebih bayar sebesar Rp 1,204,680.00
- d. Pengadaan Belanja Bahan Seminar Kit Kegiatan Bawaslu Prov. Kepulauan Riau Tidak Sesuai Ketentuan dan Terdapat Pemahalan Sebesar Rp16,273,500.00

maupun pemeriksaan BPKP sebesar Rp 208,133,196.00 pada periode Semester I Tahun 2024 (1 Januari 2025 sampai 30 Juni 2025) pada Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau telah seluruhnya ditindak lanjuti pada Satuan Kerja Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.

F.4 Informasi Capaian Output

Dalam rangka mewujudkan belanja K/L yang lebih berkualitas, lebih baik (*spending better*), dan sesuai dengan tata kelola yang baik (*good governance*), serta memberikan penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran yang lebih transparan dan akuntabel, telah ditetapkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER4/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga sebagai pengganti PER-4/PB/2020. (Laporan Realisasi Kinerja Terlampir).

F.5 Program Prioritas Nasional

Prioritas Nasional VII - Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Pelaksanaannya di antaranya melalui 1 (satu) program prioritas, 9 (sembilan) kegiatan prioritas, yang tersebar di 2 (dua) Satuan Kerja dengan pagu mencapai Rp 8,753,917,000.00 dan realisasi sebesar Rp 8,753,875,498.00 dengan rincian sebagai berikut.

Kementerian/Lembaga : 115 - BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Unit Organisasi : 115.01 - Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum

Satker : Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau

Tabel 55. Program Prioritas Nasional

Program Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	%
Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	8,753,917,000.00	8,753,875,498.00	100	Predikat	Baik	Baik	100

L A M P I R A N LAPORAN KEUANGAN A U D I T E D TINGKAT UAPPA-W



T.A 2025



JL. WR. Supratman No. 4 - 7 Km. 8 Tanjungpinang
Telp/Fax. 0771-4444074, set.kepri@bawaslu.go.id
Laman : kepri.bawaslu.go.id

Nomor : 63/KU.03/KR/05/2026 Tanjungpinang, 7 Mei 2026
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Laporan Keuangan UAPPA-W Audited TA 2025

Yth.

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau

di-

Tanjungpinang

Sehubungan dengan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-133/WPB.05/2026 tanggal 07 April 2026 maka bersama ini, kami sampaikan Laporan Keuangan Audited TA 2025 tingkat UAPPA-W Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.

Kuasa Pengguna Anggaran,



RIDWAN, S.H

LAPORAN REALISASI KINERJA

Tahun Anggaran 2025

Periode s.d bulan : 2025-14
Kementerian Negara/Lembaga : 115 - BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Eselon 1 : 115.01 - Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
Wilayah/Provinsi : 32.51 - KOTA BATAM/KEPULAUAN RIAU
Satuan Kerja : 686239 - SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Halaman : 1
Tanggal Cetak : 28-04-2026

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian			
01	PELAYANAN UMUM	39,902,229,000.00	37,078,381,184.00	92.92%							
01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI	39,902,229,000.00	37,078,381,184.00	92.92%							
CQ	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	9,106,981,000.00	9,061,390,266.00	99.5%							
5245	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	8,983,151,000.00	8,976,082,126.00	99.92%							
BAH	Pelayanan Publik Lainnya	25,904,000.00	25,556,000.00	98.66%							
001	Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	25,904,000.00	25,556,000.00	98.66%	1.0000	Layanan	1.0000	100%	1.34%		
BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	8,957,247,000.00	8,950,526,126.00	99.92%							
001	Laporan Hasil Pencegahan/ Pengawasan Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	203,330,000.00	196,650,628.00	96.72%	5.0000	Laporan	5.0000	100%	3.28%		
002	Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	4,338,800,000.00	4,338,784,123.00	100%	1.0000	Lembaga	1.0000	100%	0%		
003	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 01	682,627,000.00	682,622,612.00	100%	1.0000	Lembaga	1.0000	100%	0%		
004	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 02	1,044,506,000.00	1,044,497,450.00	100%	1.0000	Lembaga	1.0000	100%	0%		

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian			
005	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 03	659,810,000.00	659,805,780.00	100%	1.0000	Lembaga	1.0000	100%	0%		
006	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 04	574,939,000.00	574,934,899.00	100%	1.0000	Lembaga	1.0000	100%	0%		
007	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 05	924,544,000.00	924,541,368.00	100%	1.0000	Lembaga	1.0000	100%	0%		
008	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 06	528,691,000.00	528,689,266.00	100%	1.0000	Lembaga	1.0000	100%	0%		
7013	Penguatan Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif	27,880,000.00	26,680,000.00	95.7%							
QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	27,880,000.00	26,680,000.00	95.7%							
002	Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif	27,880,000.00	26,680,000.00	95.7%	1.0000	Lembaga	1.0000	100%	4.3%		
7014	Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan	95,950,000.00	58,628,140.00	61.1%							
QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	95,950,000.00	58,628,140.00	61.1%							
002	Hasil Pengawasan DPT Berkelanjutan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	95,950,000.00	58,628,140.00	61.1%	2.0000	Laporan	2.0000	100%	38.9%		
WA	Program Dukungan Manajemen	30,795,248,000.00	28,016,990,918.00	90.98%							
4355	Pemeriksaan, Pengendalian, Dan Pengawasan Internal	13,245,000.00	12,987,000.00	98.05%							
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	13,245,000.00	12,987,000.00	98.05%							
961	Layanan Reformasi Kinerja	13,245,000.00	12,987,000.00	98.05%	10.0000	Dokumen	10.0000	100%	1.95%		
4356	Pengelolaan Data dan Informasi	35,385,000.00	29,433,300.00	83.18%							
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	35,385,000.00	29,433,300.00	83.18%							

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian			
958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Bawaslu	21,965,000.00	18,719,900.00	85.23%	2.0000	Laporan	2.0000	100%	14.77%		
963	Layanan Data dan Informasi	13,420,000.00	10,713,400.00	79.83%	2.0000	Laporan	2.0000	100%	20.17%		
6849	Pengelolaan Keuangan, BMN, Dan Umum	25,365,698,000.00	23,112,258,736.00	91.12%							
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	23,722,261,000.00	21,490,220,936.00	90.59%							
956	Layanan BMN	16,987,000.00	16,805,000.00	98.93%	1.0000	Layanan	1.0000	100%	1.07%		
994	Layanan Perkantoran	23,705,274,000.00	21,473,415,936.00	90.58%	1.0000	Layanan	1.0000	100%	9.42%		
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1,294,000,000.00	1,292,893,461.00	99.91%							
951	Layanan Sarana Internal	1,294,000,000.00	1,292,893,461.00	99.91%	65.0000	Unit	65.0000	100%	0.09%		
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	349,437,000.00	329,144,339.00	94.19%							
952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	35,612,000.00	30,094,458.00	84.51%	2.0000	Dokumen	2.0000	100%	15.49%		
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	241,870,000.00	236,382,616.00	97.73%	2.0000	Dokumen	2.0000	100%	2.27%		
955	Layanan Manajemen Keuangan	60,225,000.00	51,050,265.00	84.77%	2.0000	Dokumen	2.0000	100%	15.23%		
974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	11,730,000.00	11,617,000.00	99.04%	2.0000	Dokumen	2.0000	100%	0.96%		
6850	Pengelolaan Organisasi Dan SDM	5,380,920,000.00	4,862,311,882.00	90.36%							
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	5,342,015,000.00	4,835,916,882.00	90.53%							
957	Layanan Hukum	30,050,000.00	29,382,400.00	97.78%	5.0000	Laporan	5.0000	100%	2.22%		

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian			
962	Layanan Umum	5,306,040,000.00	4,803,616,982.00	90.53%	2.0000	Dokumen	2.0000	100%	9.47%		
969	Layanan Bantuan Hukum	5,925,000.00	2,917,500.00	49.24%	3.0000	Laporan	3.0000	100%	50.76%		
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	38,905,000.00	26,395,000.00	67.84%							
954	Layanan Manajemen SDM	38,905,000.00	26,395,000.00	67.84%	175.0000	Orang	175.0000	100%	32.16%		



JL. WR. Supratman No. 4 - 7 Km. 8 Tanjungpinang
Telp/Fax. 0771-4444074, set.kepri@bawaslu.go.id
Laman : kepri.bawaslu.go.id

**LAPORAN HASIL PENILAIAN
PENERAPAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 1/KU.03/KR/02/2026**

BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Kami telah melaksanakan penilaian penerapan pengendalian intern atas pelaporan keuangan pada Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Penilaian dilakukan terhadap Pengendalian Intern Tingkat Entitas, Pengendalian Umum Teknologi Informasi Dan Komunikasi, dan Pengendalian Intern Tingkat Proses/Transaksi dengan rincian terlampir. Pengembangan dan pelaksanaan pengendalian intern sepenuhnya merupakan tanggung jawab manajemen.

Sistem pengendalian intern, meskipun dirancang dan dilaksanakan dengan baik, tetap memiliki keterbatasan sehingga terdapat kemungkinan kesalahan terjadi dan tidak terdeteksi. Oleh karena itu, meskipun dinyatakan efektif, pengendalian tersebut hanya dapat memberikan keyakinan yang memadai mengenai keandalan pelaporan keuangan.

Berdasarkan penilaian tersebut, kami menyimpulkan bahwa pada tanggal 31 Januari 2026, pengendalian intern atas pelaporan keuangan tingkat unit akuntansi dan pelaporan keuangan kuasa pengguna anggaran adalah efektif.

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka dapat dinyatakan bahwa pengendalian intern atas pelaporan keuangan tingkat unit akuntansi dan pelaporan keuangan kuasa pengguna anggaran adalah memadai.

Tanjungpinang, 31 Januari 2026
Pimpinan Tim,



SISKA ERNIDA WATI, S.Si
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19900924 201503 2 003

Lampiran I:

Laporan Hasil Penilaian PIPK Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau

A. Daftar Akun Signifikan yang dinilai

- 1. Akun Kas Lainnya di K/L dari Hibah
- 2. Akun Kas Lainnya di BP
- 3. Akun Beban Perjalanan Dinas
- 4. Akun Peralatan dan Mesin

B. Daftar Kelemahan Material dan/atau Kelemahan Signifikan

NO				Rekomendasi
	Uraian	Sebab	Akibat	
1	Tidak ada temuan, baik kelemahan material, kelemahan signifikan maupun kelemahan yang berdampak			

1. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-W

KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
TAHUNAN TA 2025

Kode dan Nama UAKPA : (686239) SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Kode dan Nama UAPPAW : (686239) SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Kode dan Nama Eselon 1 : (01) SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Kode dan Nama K/L : (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Objek Penelaahan		Kondisi LK		Seharusnya
Beri tanda centang (✓) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A				
Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran				
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN				
	Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Pernyataan Tanggung Jawab	✓		Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	✓		Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	✓		Ada
	Laporan Keuangan Tambahan	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Neraca Percobaan AkruaI Saldo Awal	✓		Ada
2	Neraca Percobaan AkruaI	✓		Ada
3	Neraca Percobaan Kas	✓		Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	✓		Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI				
	Kesesuaian Saldo	Sama	Tidak	Seharusnya
1.	Semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	✓		Sama
Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.				
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI				
	Persamaan Dasar Akuntansi	Sama	Tidak	Seharusnya
1	Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	✓		Sama
2	Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	✓		Sama
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	✓		Sama
PENGECEKAN PADA MONSAKTI				
	To Do List	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan		✓	Tidak
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)	✓		Ya
3	Terdapat Persediaan Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		✓	Tidak
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		✓	Tidak
5	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		✓	Tidak
6	Terdapat Aset Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		✓	Tidak
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		✓	Tidak
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		✓	Tidak
9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		✓	Tidak

10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang		✓	Tidak
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		✓	Tidak
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		✓	Tidak
Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah				
	Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		✓	Tidak
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		✓	Tidak
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		✓	Tidak
	a. Pagu/DIPA		✓	Tidak
	b. Estimasi PNBPN		✓	Tidak
	c. Belanja		✓	Tidak
	d. Pengembangan Belanja		✓	Tidak
	e. Pendapatan		✓	Tidak
	f. Pengembangan Belanja		✓	Tidak
	g. Kas BLU		✓	Tidak
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		✓	Tidak
	i. Kas Hibah		✓	Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung		✓	Tidak
	Rekon Internal	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Selisih Rekon Internal		✓	Tidak
	Daftar MONSAKTI	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah Saldo Tidak Normal ? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)		✓	Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregister)		✓	Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		✓	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		✓	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		✓	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		✓	Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL				
	Pengecekan Saldo Neraca Percobaan	Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrua		✓	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		✓	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		✓	Tidak
	Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	✓		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	✓		Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)	✓		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)	✓		Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)	✓		Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	✓		Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)	✓		Ya
	Akun-Akun yang tidak boleh ada	Ya	Tidak	Seharusnya

1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		✓	Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)		✓	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		✓	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-lain		✓	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		✓	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		✓	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		✓	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/Hibah)		✓	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		✓	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		✓	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/ Lain-Lain/Transfer TAYL)		✓	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		✓	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)		✓	Tidak
	Jika Bukan Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"		✓	Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		✓	Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		✓	Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		✓	Tidak
	Terkait Satker BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		✓	Tidak
	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah			
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		✓	Tidak
	Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi ent	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial		✓	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		✓	Tidak
	Hibah Langsung	Ada	Tidak	Seharusnya
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya			

1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.		✓	Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)		✓	Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)		✓	Tidak
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?		✓	Tidak
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?		✓	Tidak
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya			
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang		✓	Tidak
	Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal			
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI			
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)			
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		✓	Tidak
	Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?		✓	Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?		✓	Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP AkruaI?		✓	Tidak
	Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		✓	Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?		✓	Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam Calk			
	Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah		✓	Tidak
PENGECEKAN NERACA				
	Pengecekan Pos-pos Neraca	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	✓		Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	✓		Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	✓		Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	✓		Ya

5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito		✓	Tidak
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		✓	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?		✓	Tidak
8	Terdapat saldo bernilai desimal		✓	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL				
	Pengecekan Pos-pos LO	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)	✓		Ya
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) , atau akun-akun lainnya yang merupakan akun BUN		✓	Tidak
3	Terdapat kodefikasi atau uraian akun null		✓	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	✓		Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?	✓		Ya
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	✓		Ya
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		✓	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS				
	Pengecekan Pos-pos LPE	Ya	Tidak	Seharusnya
1	"Ekuitas Awal + Kenaikan/ Penurunan Ekuitas - Ekuitas Akhir"	✓		Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya		✓	Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP		✓	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		✓	Tidak
	Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?	✓		Ya
	Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal senilai Rp100.000.000, transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas senilai Rp51.500.000 dengan dokumen sumber BAST			
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)	✓		Ya
PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B)				
	Pengecekan Pos-pos LRA/B/P	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat saldo negatif di LRAB		✓	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		✓	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		✓	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		✓	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		✓	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)		✓	Tidak

7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)		✓	Tidak
TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN				
	Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :		✓	Tidak
	- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)		✓	Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)		✓	Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang		✓	Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :		✓	Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		✓	Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :	✓		Ya
	- Beban Persediaan (di LO)	✓		Ya
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :	✓		Ya
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)	✓		Ya
	- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	✓		Ya
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrua?		✓	Tidak
	Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?		✓	Tidak
	Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?		✓	Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan		✓	Tidak
2	Apakah ada Beban Bansos ?		✓	Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan		✓	Tidak
	Pengecekan Jurnal Manual Akrua pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus Ditatausahakan)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca		✓	Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas		✓	Tidak
	- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211)		✓	Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca		✓	Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan		✓	Tidak
	- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar		✓	Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada	✓		Ya
TELAAH LK BLU				
	LPSAL BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?		✓	Tidak
2	Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?		✓	Tidak
3	Apakah formula perhitungnan SAL pada LPSAL telah sesuai?		✓	Tidak
4	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun		✓	Tidak
5	Apakah Nilai SiLPA/SiKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit)		✓	Tidak
6	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun		✓	Tidak
	LAK BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx,		✓	Tidak
2	Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas		✓	Tidak
3	Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca		✓	Tidak
4	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di		✓	Tidak
5	Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU		✓	Tidak
6	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada		✓	Tidak
7	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun		✓	Tidak
LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN				

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan MONSAKTI"

Mengetahui
Penyusun LKKL,



Rini Setiyawati
NIP. 200302022025052003



Tanjungpinang, 07 Mei 2026
Penelaah,



Riwan, S.H
NIP. 198507092010011020

|

|

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT WILAYAH
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
ESELON I : (01) Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
WILAYAH/PROVINSI : (115013200KD) BA(115) ES1(01) KEPULAUAN RIAU

Tgl Data : 07/05/26 6:36 AM

Tgl Cetak : 07/05/26 1:51 PM

Halaman : 1

lap_lo_uappaw_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Cukai	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	-
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	-
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	-
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	-
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	-
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	-
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	435,313	(435,313)	-
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	435,313	(435,313)	-
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	-
Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan	0	435,313	(435,313)	-
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	-
Beban Pegawai	16,687,244,294	10,040,756,895	6,646,487,399	-
Beban Persediaan	0	205,215,000	(205,215,000)	-
Beban Barang dan Jasa	12,188,628,690	72,563,145,367	(60,374,516,677)	-
Beban Pemeliharaan	517,187,882	1,416,227,047	(899,039,165)	-
Beban Perjalanan Dinas	11,972,577,466	80,947,989,916	(68,975,412,450)	-
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	-

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT WILAYAH
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (115) **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
ESELON I : (01) **Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum**
WILAYAH/PROVINSI : (115013200KD) **BA(115) ES1(01) KEPULAUAN RIAU**

Tgl Data : 07/05/26 6:36 AM

Tgl Cetak : 07/05/26 1:51 PM

Halaman : 2

lap_lo_uappaw_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	-
Beban Subsidi	0	0	0	-
Beban Hibah	0	0	0	-
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1,417,718,822	1,090,976,997	326,741,825	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	-
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	-
Beban Lain-Lain	0	0	0	-
JUMLAH BEBAN	42,783,357,154	166,264,311,222	(123,480,954,068)	-
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(42,783,357,154)	(166,263,875,909)	123,480,518,755	-
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	-
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	2,568,000	6,520,000	(3,952,000)	-
Pendapatan Pelepasan Aset	2,568,000	6,520,000	(3,952,000)	-
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	-
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	13,513,008	172,452,823	(158,939,815)	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	13,513,008	172,452,823	(158,939,815)	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	-
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	16,081,008	178,972,823	(162,891,815)	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(42,767,276,146)	(166,084,903,086)	123,317,626,940	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
Beban Luar Biasa	0	0	0	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
SURPLUS/DEFISIT - LO	(42,767,276,146)	(166,084,903,086)	123,317,626,940	-

Keterangan :

FINAL

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT WILAYAH
PER 1 JANUARI 2025 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 115 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : BA(115) ES1(01) KEPULAUAN RIAU

Tgl. Cetak 07/05/2026
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_uappaw_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	3,907,332	0
0.0	111822	Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah	36,218,843,864	0
0.0	114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)	1,279,625,433	0
0.0	131111	Tanah	32,642,899	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	14,641,697,287	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	161,218,481	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	10,137,156,813
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	14,509,665
0.0	162151	Software	77,200,000	0
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	77,200,000
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	18,823,017
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	19,269,317
0.0	391111	Ekuitas	0	42,148,176,484
JUMLAH			52,415,135,296	52,415,135,296

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT WILAYAH
MENURUT JENIS BELANJA / KODE AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 115 **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
ESELON I : 01 **Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum**
WILAYAH/PROVINSI : 115013200KD **BA(115) ES1(01) KEPULAUAN RIAU**

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/26 1:54 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_uappaw_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	317,869,000	1,345,526,000	1,344,185,760	0	1,344,185,760	99.9	1,340,240
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	96,000	808,000	20,947	431	20,516	2.54	787,484
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	29,176,000	120,139,000	76,515,248	0	76,515,248	63.69	43,623,752
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	16,892,000	66,282,000	19,453,006	0	19,453,006	29.35	46,828,994
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	54,160,000	101,950,000	83,690,000	540,000	83,150,000	81.56	18,800,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	9,360,000	50,800,000	39,004,000	0	39,004,000	76.78	11,796,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	216,102,000	294,755,000	5,595,739	0	5,595,739	1.9	289,159,261
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	28,032,000	120,669,000	77,706,660	0	77,706,660	64.4	42,962,340
511129	Belanja Uang Makan PNS	338,400,000	433,534,000	318,448,000	0	318,448,000	73.45	115,086,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	19,980,000	74,485,000	63,200,000	555,000	62,645,000	84.1	11,840,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	1,030,067,000	2,608,948,000	2,027,819,360	1,095,431	2,026,723,929	57.77	582,224,071
5113	Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara							
511332	Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	4,658,112,000	4,797,373,000	4,660,935,150	0	4,660,935,150	97.16	136,437,850
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5113	4,658,112,000	4,797,373,000	4,660,935,150	0	4,660,935,150	97.16	136,437,850
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	1,155,252,000	3,148,924,000	3,112,988,640	0	3,112,988,640	98.86	35,935,360
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	358,000	1,031,000	48,281	0	48,281	4.68	982,719
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	114,721,000	286,806,000	203,771,990	744,390	203,027,600	70.79	83,778,400
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	79,265,000	147,931,000	55,794,672	150,690	55,643,982	37.61	92,287,018
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	270,000,000	332,875,000	271,375,000	0	271,375,000	81.52	61,500,000
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	147,168,000	289,737,000	190,273,345	434,520	189,838,825	65.52	99,898,175
511628	Belanja Uang Makan PPPK	259,740,000	632,580,000	614,470,000	0	614,470,000	97.14	18,110,000
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	0	70,855,000	26,645,000	0	26,645,000	37.6	44,210,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	2,026,504,000	4,910,739,000	4,475,366,928	1,329,600	4,474,037,328	61.72	436,701,672
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	220,926,000	209,412,000	134,956,000	0	134,956,000	64.45	74,456,000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	217,802,000	446,445,000	187,658,000	0	187,658,000	42.03	258,787,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	438,728,000	655,857,000	322,614,000	0	322,614,000	53.24	333,243,000
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT WILAYAH
MENURUT JENIS BELANJA / KODE AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 115 **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
ESELON I : 01 **Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum**
WILAYAH/PROVINSI : 115013200KD **BA(115) ES1(01) KEPULAUAN RIAU**

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/26 1:54 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_uappaw_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1,723,482,000	2,182,045,000	2,008,535,080	0	2,008,535,080	92.05	173,509,920
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	1,751,560,000	3,256,828,000	3,204,210,411	0	3,204,210,411	98.38	52,617,589
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	3,475,042,000	5,438,873,000	5,212,745,491	0	5,212,745,491	95.22	226,127,509
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	11,628,453,000	18,411,790,000	16,699,480,929	2,425,031	16,697,055,898	63.72	1714734102
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	6,940,595,000	3,684,154,000	3,458,828,536	17,952,098	3,440,876,438	93.4	243,277,562
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	19,680,000	3,858,000	287,000	0	287,000	7.44	3,571,000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	431,688,000	303,509,000	290,812,560	0	290,812,560	95.82	12,696,440
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	209,472,000	207,569,000	191,312,523	0	191,312,523	92.17	16,256,477
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	7,601,435,000	4,199,090,000	3,941,240,619	17,952,098	3,923,288,521	72.21	275,801,479
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	434,737,000	745,911,000	654,630,004	0	654,630,004	87.76	91,280,996
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	0	1,976,523,000	1,976,522,740	0	1,976,522,740	100	260
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	74,916,000	68,716,509	0	68,716,509	91.72	6,199,491
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	434,737,000	2,797,350,000	2,699,869,253	0	2,699,869,253	93.16	97,480,747
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	20,537,000	17,825,000	0	0	0	0	17,825,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	20,537,000	17,825,000	0	0	0	0	17,825,000
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	443,448,000	416,622,000	325,472,016	0	325,472,016	78.12	91,149,984
522112	Belanja Langganan Telepon	15,412,000	9,000,000	3,685,200	0	3,685,200	40.95	5,314,800
522113	Belanja Langganan Air	39,800,000	35,767,000	25,942,450	0	25,942,450	72.53	9,824,550
522131	Belanja Jasa Konsultan	75,440,000	0	0	0	0	0	0
522141	Belanja Sewa	4,560,952,000	3,067,653,000	2,952,921,699	0	2,952,921,699	96.26	114,731,301
522151	Belanja Jasa Profesi	702,700,000	334,605,000	315,604,800	0	315,604,800	94.32	19,000,200
522191	Belanja Jasa Lainnya	199,320,000	687,684,000	674,952,493	0	674,952,493	98.15	12,731,507
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	6,037,072,000	4,551,331,000	4,298,578,658	0	4,298,578,658	68.62	252,752,342
5231	Belanja Pemeliharaan							
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,328,538,000	613,794,000	517,187,882	0	517,187,882	84.26	96,606,118

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT WILAYAH
MENURUT JENIS BELANJA / KODE AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 115 **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
ESELON I : 01 **Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum**
WILAYAH/PROVINSI : 115013200KD **BA(115) ES1(01) KEPULAUAN RIAU**

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/26 1:54 PM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_uappaw_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	1,328,538,000	613,794,000	517,187,882	0	517,187,882	84.26	96,606,118
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3,324,914,000	6,325,709,000	6,247,153,707	147,595,858	6,099,557,849	96.42	226,151,151
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	332,750,000	657,034,000	630,395,000	160,000	630,235,000	95.92	26,799,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	1,418,214,000	1,417,393,180	0	1,417,393,180	99.94	820,820
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	973,244,000	4,061,426,000	3,890,109,221	63,187,784	3,826,921,437	94.23	234,504,563
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	4,630,908,000	12,462,383,000	12,185,051,108	210,943,642	11,974,107,466	96.63	488,275,534
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	20,053,227,000	24,641,773,000	23,641,927,520	228,895,740	23,413,031,780	75.97	1228741220
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	2,019,500,000	2,014,474,461	0	2,014,474,461	99.75	5,025,539
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	0	2,019,500,000	2,014,474,461	0	2,014,474,461	99.75	5,025,539
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	0	2,019,500,000	2,014,474,461	0	2,014,474,461	99.75	5025539
	JUMLAH BELANJA	31,681,680,000	45,073,063,000	42,355,882,910	231,320,771	42,124,562,139	93.97	2,948,500,861

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT WILAYAH
MENURUT SATUAN KERJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 115 **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
WILAYAH/PROVINSI : 115013200KD **BA(115) ES1(01) KEPULAUAN RIAU**

Kode Lap : LRA.P.W.3
Tanggal : 07/05/26 1:53 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_uappaw

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
419772	SEKRETARIAT BAWASLU KOTA TANJUNG PINANG					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	2,568,000	0	2,568,000	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	8	0	8	0
	JUMLAH PENDAPATAN (419772) - SEKRETARIAT BAWASLU KOTA TANJUNG PINANG	0	2,568,008	0	2,568,008	0
686239	SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU					
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	17,420,332	0	17,420,332	0
	JUMLAH PENDAPATAN (686239) - SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU	0	17,420,332	0	17,420,332	0
	JUMLAH PENDAPATAN	0	19,988,340	0	19,988,340	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT WILAYAH
MENURUT SATUAN KERJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 115 **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
WILAYAH/PROVINSI : 115013200KD **BA(115) ES1(01) KEPULAUAN RIAU**

Kode Lap : LRA.P.W.3
Tanggal : 07/05/26 1:53 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_org_uappaw

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
419772	SEKRETARIAT BAWASLU KOTA TANJUNG PINANG	0	2,568,008	0	2,568,008	
686239	SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU	0	17,420,332	0	17,420,332	
JUMLAH		0	19,988,340	0	19,988,340	

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT WILAYAH
MENURUT AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 115
WILAYAH/PROVINSI : 115013200KD

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
BA(115) ES1(01) KEPULAUAN RIAU

Kode Lap : LRA.P.W.1
Tanggal : 07/05/26 1:53 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pend_akun_uappaw --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	2,568,000	0	2,568,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	0	2,568,000	0	2,568,000	
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	8	0	8	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	17,420,332	0	17,420,332	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	17,420,340	0	17,420,340	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	0	19,988,340	0	19,988,340	
	JUMLAH PENDAPATAN	0	19,988,340	0	19,988,340	

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
TINGKAT UAPPAW
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 115
UAPPAW : 115013200KD

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
BA(115) ES1(01) KEPULAUAN RIAU

Kode Lap : LRA.B.E1.2
Tanggal : 07/05/26 1:53 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_uappa

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
CQ	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi							
5245	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	1,187,495,000	285,402,000	278,569,692	3,215,872	275,353,820	97.61	10,048,180
7013	Penguatan Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif	0	27,880,000	26,680,000	0	26,680,000	95.7	1,200,000
7014	Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan	11,180,000	118,310,000	80,794,140	0	80,794,140	68.29	37,515,860
	JUMLAH BELANJA PROGRAM CQ	1,198,675,000	431,592,000	386,043,832	3,215,872	382,827,960	89.45	48,764,040
WA	Program Dukungan Manajemen							
4355	Pemeriksaan, Pengendalian, Dan Pengawasan Internal	48,330,000	13,920,000	13,516,000	0	13,516,000	97.1	404,000
4356	Pengelolaan Data dan Informasi	273,406,000	36,735,000	30,701,300	0	30,701,300	83.58	6,033,700
6849	Pengelolaan Keuangan, BMN, Dan Umum	27,895,728,000	29,168,064,000	26,825,061,898	20,927,129	26,804,134,769	91.97	2,363,929,231
6850	Pengelolaan Organisasi Dan SDM	2,265,541,000	6,001,180,000	5,679,031,653	207,116,790	5,471,914,863	94.63	529,265,137
	JUMLAH BELANJA PROGRAM WA	30,483,005,000	35,219,899,000	32,548,310,851	228,043,919	32,320,266,932	92.41	2,899,632,068
	JUMLAH BELANJA RUPIAH MURNI	31,681,680,000	35,651,491,000	32,934,354,683	231,259,791	32,703,094,892	92.38	2,948,396,108
10	HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI							
CQ	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi							
5245	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	0	9,421,572,000	9,421,528,227	60,980	9,421,467,247	100	104,753
	JUMLAH BELANJA PROGRAM CQ	0	9,421,572,000	9,421,528,227	60,980	9,421,467,247	100	104,753

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
TINGKAT UAPPAW
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 115
UAPPAW : 115013200KD

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
BA(115) ES1(01) KEPULAUAN RIAU

Kode Lap : LRA.B.E1.2
Tanggal : 07/05/26 1:53 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_uappa

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH BELANJA HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI	0	9,421,572,000	9,421,528,227	60,980	9,421,467,247	100	104,753
	JUMLAH	31,681,680,000	45,073,063,000	42,355,882,910	231,320,771	42,124,562,139	93.97	2,948,500,861

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT UAPPAW
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 115 **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
UAPPAW : 115013200KD BA(115) ES1(01) KEPULAUAN RIAU

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 07/05/26 1:52 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_sd_jb_akun_uappaw_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
51	BELANJA PEGAWAI							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	317,869,000	1,345,526,000	1,344,185,760	0	1,344,185,760	99.9	1,340,240
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	96,000	808,000	20,947	431	20,516	2.54	787,484
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	29,176,000	120,139,000	76,515,248	0	76,515,248	63.69	43,623,752
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	16,892,000	66,282,000	19,453,006	0	19,453,006	29.35	46,828,994
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	54,160,000	101,950,000	83,690,000	540,000	83,150,000	81.56	18,800,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	9,360,000	50,800,000	39,004,000	0	39,004,000	76.78	11,796,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	216,102,000	294,755,000	5,595,739	0	5,595,739	1.9	289,159,261
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	28,032,000	120,669,000	77,706,660	0	77,706,660	64.4	42,962,340
511129	Belanja Uang Makan PNS	338,400,000	433,534,000	318,448,000	0	318,448,000	73.45	115,086,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	19,980,000	74,485,000	63,200,000	555,000	62,645,000	84.1	11,840,000
511332	Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	4,658,112,000	4,797,373,000	4,660,935,150	0	4,660,935,150	97.16	136,437,850
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	1,155,252,000	3,148,924,000	3,112,988,640	0	3,112,988,640	98.86	35,935,360
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	358,000	1,031,000	48,281	0	48,281	4.68	982,719
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	114,721,000	286,806,000	203,771,990	744,390	203,027,600	70.79	83,778,400
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	79,265,000	147,931,000	55,794,672	150,690	55,643,982	37.61	92,287,018
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	270,000,000	332,875,000	271,375,000	0	271,375,000	81.52	61,500,000
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	147,168,000	289,737,000	190,273,345	434,520	189,838,825	65.52	99,898,175
511628	Belanja Uang Makan PPPK	259,740,000	632,580,000	614,470,000	0	614,470,000	97.14	18,110,000
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	0	70,855,000	26,645,000	0	26,645,000	37.6	44,210,000
512211	Belanja Uang Lembur	220,926,000	209,412,000	134,956,000	0	134,956,000	64.45	74,456,000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	217,802,000	446,445,000	187,658,000	0	187,658,000	42.03	258,787,000
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1,723,482,000	2,182,045,000	2,008,535,080	0	2,008,535,080	92.05	173,509,920
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	1,751,560,000	3,256,828,000	3,204,210,411	0	3,204,210,411	98.38	52,617,589
	JUMLAH BELANJA PEGAWAI	11,628,453,000	18,411,790,000	16,699,480,929	2,425,031	16,697,055,898	90.7	1,709,884,040
52	BELANJA BARANG							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	6,940,595,000	3,650,070,000	3,424,747,836	17,952,098	3,406,795,738	93.34	243,274,262
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	19,680,000	3,858,000	287,000	0	287,000	7.44	3,571,000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	431,688,000	285,694,000	272,998,000	0	272,998,000	95.56	12,696,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	209,472,000	207,569,000	191,312,523	0	191,312,523	92.17	16,256,477
521211	Belanja Bahan	434,737,000	285,706,000	194,440,085	0	194,440,085	68.06	91,265,915
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	36,000,000	29,805,000	0	29,805,000	82.79	6,195,000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	20,537,000	17,825,000	0	0	0	0	17,825,000
522111	Belanja Langganan Listrik	443,448,000	398,610,000	307,461,501	0	307,461,501	77.13	91,148,499
522112	Belanja Langganan Telepon	15,412,000	8,400,000	3,085,200	0	3,085,200	36.73	5,314,800
522113	Belanja Langganan Air	39,800,000	30,000,000	20,176,650	0	20,176,650	67.26	9,823,350
522131	Belanja Jasa Konsultan	75,440,000	0	0	0	0	0	0
522141	Belanja Sewa	4,560,952,000	2,475,115,000	2,360,383,699	0	2,360,383,699	95.36	114,731,301
522151	Belanja Jasa Profesi	702,700,000	233,605,000	214,604,800	0	214,604,800	91.87	19,000,200

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT UAPPAW
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 115 **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
UAPPAW : 115013200KD BA(115) ES1(01) KEPULAUAN RIAU

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 07/05/26 1:52 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_sd_jb_akun_uappaw_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
522191	Belanja Jasa Lainnya	199,320,000	683,684,000	670,952,493	0	670,952,493	98.14	12,731,507
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,328,538,000	601,069,000	504,462,882	0	504,462,882	83.93	96,606,118
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3,324,914,000	3,118,365,000	3,039,815,257	147,595,858	2,892,219,399	92.75	226,145,601
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	332,750,000	311,297,000	284,658,000	160,000	284,498,000	91.39	26,799,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	632,142,000	631,321,180	0	631,321,180	99.87	820,820
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	973,244,000	2,241,192,000	2,069,887,187	63,126,804	2,006,760,383	89.54	234,431,617
	JUMLAH BELANJA BARANG	20,053,227,000	15,220,201,000	14,220,399,293	228,834,760	13,991,564,533	93.43	770,966,947
53	BELANJA MODAL							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	2,019,500,000	2,014,474,461	0	2,014,474,461	99.75	5,025,539
	JUMLAH BELANJA MODAL	0	2,019,500,000	2,014,474,461	0	2,014,474,461	99.75	5,025,539
	JUMLAH RUPIAH MURNI	31,681,680,000	35,651,491,000	32,934,354,683	231,259,791	32,703,094,892	92.38	2,485,876,526
10	HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI							
52	BELANJA BARANG							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	0	34,084,000	34,080,700	0	34,080,700	99.99	3,300
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	17,815,000	17,814,560	0	17,814,560	100	440
521211	Belanja Bahan	0	460,205,000	460,189,919	0	460,189,919	100	15,081
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	0	1,976,523,000	1,976,522,740	0	1,976,522,740	100	260
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	38,916,000	38,911,509	0	38,911,509	99.99	4,491
522111	Belanja Langganan Listrik	0	18,012,000	18,010,515	0	18,010,515	99.99	1,485
522112	Belanja Langganan Telepon	0	600,000	600,000	0	600,000	100	0
522113	Belanja Langganan Air	0	5,767,000	5,765,800	0	5,765,800	99.98	1,200
522141	Belanja Sewa	0	592,538,000	592,538,000	0	592,538,000	100	0
522151	Belanja Jasa Profesi	0	101,000,000	101,000,000	0	101,000,000	100	0
522191	Belanja Jasa Lainnya	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000	100	0
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	12,725,000	12,725,000	0	12,725,000	100	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	3,207,344,000	3,207,338,450	0	3,207,338,450	100	5,550
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	345,737,000	345,737,000	0	345,737,000	100	0
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	786,072,000	786,072,000	0	786,072,000	100	0
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	1,820,234,000	1,820,222,034	60,980	1,820,161,054	100	72,946
	JUMLAH BELANJA BARANG	0	9,421,572,000	9,421,528,227	60,980	9,421,467,247	100	(17,207)
	JUMLAH HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI	0	9,421,572,000	9,421,528,227	60,980	9,421,467,247	100	(17,207)
	TOTAL	31,681,680,000	45,073,063,000	42,355,882,910	231,320,771	42,124,562,139	93.97	2,485,859,319

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT WILAYAH
MENURUT SATUAN KERJA/JENIS BELANJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 115 **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
ESELON I : 01 **Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum**
WILAYAH/PROVINSI : 115013200KD **BA(115) ES1(01) KEPULAUAN RIAU**

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/26 1:52 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_org_akun_wilayah_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
419772	SEKRETARIAT BAWASLU KOTA TANJUNG PINANG							
51	BELANJA PEGAWAI	1,264,234,000	2,022,361,000	1,945,177,762	185,196	1,944,992,566	96.17	77,368,434
52	BELANJA BARANG	2,452,270,000	1,958,885,000	1,945,025,013	60,980	1,944,964,033	99.29	13,920,967
53	BELANJA MODAL	0	113,500,000	112,198,000	0	112,198,000	98.85	1,302,000
	Jumlah Belanja419772SEKRETARIAT BAWASLU KOTA TANJUNG PINANG	3,716,504,000	4,094,746,000	4,002,400,775	246,176	4,002,154,599	294.31	92,591,401
686115	SEKRETARIAT BAWASLU KOTA BATAM							
51	BELANJA PEGAWAI	16,764,000	16,764,000	5,447,000	0	5,447,000	32.49	11,317,000
52	BELANJA BARANG	227,914,000	447,324,000	430,106,591	0	430,106,591	96.15	17,217,409
53	BELANJA MODAL	0	612,000,000	609,383,000	0	609,383,000	99.57	2,617,000
	Jumlah Belanja686115SEKRETARIAT BAWASLU KOTA BATAM	244,678,000	1,076,088,000	1,044,936,591	0	1,044,936,591	228.21	31,151,409
686239	SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU							
51	BELANJA PEGAWAI	10,347,455,000	16,372,665,000	14,748,856,167	2,239,835	14,746,616,332	90.07	1,626,048,668
52	BELANJA BARANG	17,373,043,000	22,235,564,000	21,266,795,916	228,834,760	21,037,961,156	94.61	1,197,602,844
53	BELANJA MODAL	0	1,294,000,000	1,292,893,461	0	1,292,893,461	99.91	1,106,539
	Jumlah Belanja686239SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU	27,720,498,000	39,902,229,000	37,308,545,544	231,074,595	37,077,470,949	284.59	2,824,758,051
	JUMLAH BELANJA	31,681,680,000	45,073,063,000	42,355,882,910	231,320,771	42,124,562,139	807.11	2,948,500,861

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SATUAN KERJA
TINGKAT UAPPAW
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 115 **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
UAPPAW : 115013200KD BA(115) ES1(01) KEPULAUAN RIAU

Kode Lap : LRA.B.E1.2
Tanggal : 07/05/26 1:52 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_org_uappaw_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
419772	SEKRETARIAT BAWASLU KOTA TANJUNG PINANG	3,716,504,000	4,094,746,000	4,002,400,775	246,176	4,002,154,599	97.74	92,591,401
686115	SEKRETARIAT BAWASLU KOTA BATAM	244,678,000	1,076,088,000	1,044,936,591	0	1,044,936,591	97.11	31,151,409
686239	SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU	27,720,498,000	39,902,229,000	37,308,545,544	231,074,595	37,077,470,949	92.92	2,824,758,051
JUMLAH		31,681,680,000	45,073,063,000	42,355,882,910	231,320,771	42,124,562,139	95.923	2,948,500,861

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT WILAYAH
MENURUT JENIS BELANJA / KODE AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 115 **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
ESELON I : 01 **Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum**
WILAYAH/PROVINSI : 115013200KD **BA(115) ES1(01) KEPULAUAN RIAU**

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/26 1:52 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_uappaw_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	317,869,000	1,345,526,000	1,344,185,760	0	1,344,185,760	99.9	1,340,240
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	96,000	808,000	20,947	431	20,516	2.54	787,484
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	29,176,000	120,139,000	76,515,248	0	76,515,248	63.69	43,623,752
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	16,892,000	66,282,000	19,453,006	0	19,453,006	29.35	46,828,994
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	54,160,000	101,950,000	83,690,000	540,000	83,150,000	81.56	18,800,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	9,360,000	50,800,000	39,004,000	0	39,004,000	76.78	11,796,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	216,102,000	294,755,000	5,595,739	0	5,595,739	1.9	289,159,261
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	28,032,000	120,669,000	77,706,660	0	77,706,660	64.4	42,962,340
511129	Belanja Uang Makan PNS	338,400,000	433,534,000	318,448,000	0	318,448,000	73.45	115,086,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	19,980,000	74,485,000	63,200,000	555,000	62,645,000	84.1	11,840,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	1,030,067,000	2,608,948,000	2,027,819,360	1,095,431	2,026,723,929	57.77	582,224,071
5113	Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara							
511332	Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	4,658,112,000	4,797,373,000	4,660,935,150	0	4,660,935,150	97.16	136,437,850
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5113	4,658,112,000	4,797,373,000	4,660,935,150	0	4,660,935,150	97.16	136,437,850
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	1,155,252,000	3,148,924,000	3,112,988,640	0	3,112,988,640	98.86	35,935,360
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	358,000	1,031,000	48,281	0	48,281	4.68	982,719
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	114,721,000	286,806,000	203,771,990	744,390	203,027,600	70.79	83,778,400
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	79,265,000	147,931,000	55,794,672	150,690	55,643,982	37.61	92,287,018
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	270,000,000	332,875,000	271,375,000	0	271,375,000	81.52	61,500,000
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	147,168,000	289,737,000	190,273,345	434,520	189,838,825	65.52	99,898,175
511628	Belanja Uang Makan PPPK	259,740,000	632,580,000	614,470,000	0	614,470,000	97.14	18,110,000
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	0	70,855,000	26,645,000	0	26,645,000	37.6	44,210,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	2,026,504,000	4,910,739,000	4,475,366,928	1,329,600	4,474,037,328	61.72	436,701,672
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	220,926,000	209,412,000	134,956,000	0	134,956,000	64.45	74,456,000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	217,802,000	446,445,000	187,658,000	0	187,658,000	42.03	258,787,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	438,728,000	655,857,000	322,614,000	0	322,614,000	53.24	333,243,000
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT WILAYAH
MENURUT JENIS BELANJA / KODE AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 115 **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
ESELON I : 01 **Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum**
WILAYAH/PROVINSI : 115013200KD **BA(115) ES1(01) KEPULAUAN RIAU**

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/26 1:52 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_uappaw_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1,723,482,000	2,182,045,000	2,008,535,080	0	2,008,535,080	92.05	173,509,920
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	1,751,560,000	3,256,828,000	3,204,210,411	0	3,204,210,411	98.38	52,617,589
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	3,475,042,000	5,438,873,000	5,212,745,491	0	5,212,745,491	95.22	226,127,509
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	11,628,453,000	18,411,790,000	16,699,480,929	2,425,031	16,697,055,898	63.72	1714734102
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	6,940,595,000	3,684,154,000	3,458,828,536	17,952,098	3,440,876,438	93.4	243,277,562
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	19,680,000	3,858,000	287,000	0	287,000	7.44	3,571,000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	431,688,000	303,509,000	290,812,560	0	290,812,560	95.82	12,696,440
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	209,472,000	207,569,000	191,312,523	0	191,312,523	92.17	16,256,477
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	7,601,435,000	4,199,090,000	3,941,240,619	17,952,098	3,923,288,521	72.21	275,801,479
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	434,737,000	745,911,000	654,630,004	0	654,630,004	87.76	91,280,996
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	0	1,976,523,000	1,976,522,740	0	1,976,522,740	100	260
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	74,916,000	68,716,509	0	68,716,509	91.72	6,199,491
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	434,737,000	2,797,350,000	2,699,869,253	0	2,699,869,253	93.16	97,480,747
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	20,537,000	17,825,000	0	0	0	0	17,825,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	20,537,000	17,825,000	0	0	0	0	17,825,000
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	443,448,000	416,622,000	325,472,016	0	325,472,016	78.12	91,149,984
522112	Belanja Langganan Telepon	15,412,000	9,000,000	3,685,200	0	3,685,200	40.95	5,314,800
522113	Belanja Langganan Air	39,800,000	35,767,000	25,942,450	0	25,942,450	72.53	9,824,550
522131	Belanja Jasa Konsultan	75,440,000	0	0	0	0	0	0
522141	Belanja Sewa	4,560,952,000	3,067,653,000	2,952,921,699	0	2,952,921,699	96.26	114,731,301
522151	Belanja Jasa Profesi	702,700,000	334,605,000	315,604,800	0	315,604,800	94.32	19,000,200
522191	Belanja Jasa Lainnya	199,320,000	687,684,000	674,952,493	0	674,952,493	98.15	12,731,507
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	6,037,072,000	4,551,331,000	4,298,578,658	0	4,298,578,658	68.62	252,752,342
5231	Belanja Pemeliharaan							
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,328,538,000	613,794,000	517,187,882	0	517,187,882	84.26	96,606,118

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT WILAYAH
MENURUT JENIS BELANJA / KODE AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 115 **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
ESELON I : 01 **Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum**
WILAYAH/PROVINSI : 115013200KD **BA(115) ES1(01) KEPULAUAN RIAU**

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/26 1:52 PM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_uappaw_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	1,328,538,000	613,794,000	517,187,882	0	517,187,882	84.26	96,606,118
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3,324,914,000	6,325,709,000	6,247,153,707	147,595,858	6,099,557,849	96.42	226,151,151
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	332,750,000	657,034,000	630,395,000	160,000	630,235,000	95.92	26,799,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	1,418,214,000	1,417,393,180	0	1,417,393,180	99.94	820,820
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	973,244,000	4,061,426,000	3,890,109,221	63,187,784	3,826,921,437	94.23	234,504,563
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	4,630,908,000	12,462,383,000	12,185,051,108	210,943,642	11,974,107,466	96.63	488,275,534
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	20,053,227,000	24,641,773,000	23,641,927,520	228,895,740	23,413,031,780	75.97	1228741220
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	2,019,500,000	2,014,474,461	0	2,014,474,461	99.75	5,025,539
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	0	2,019,500,000	2,014,474,461	0	2,014,474,461	99.75	5,025,539
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	0	2,019,500,000	2,014,474,461	0	2,014,474,461	99.75	5025539
	JUMLAH BELANJA	31,681,680,000	45,073,063,000	42,355,882,910	231,320,771	42,124,562,139	93.97	2,948,500,861

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT WILAYAH

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

UNIT ORGANISASI : (01) Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum

WILAYAH/PROVINSI : (115013200KD) BA(115) ES1(01) KEPULAUAN RIAU

Tgl Data : 07/05/26 6:36 AM

Tgl Cetak : 07/05/26 1:51 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_uappaw_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	42,124,562,139
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	19,988,340	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	2,568,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang	0	8
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang	0	17,420,332
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,344,185,760	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	20,947	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	76,515,248	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	19,453,006	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	83,690,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	39,004,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	5,595,739	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	77,706,660	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	318,448,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	63,200,000	0
3.0	511332	Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	4,660,935,150	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	3,112,988,640	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	48,281	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	203,771,990	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	55,794,672	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	271,375,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	190,273,345	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	614,470,000	0
3.0	511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	26,645,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	134,956,000	0
3.0	512212	Belanja Uang Lembur PPPK	187,658,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	2,008,535,080	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	3,204,210,411	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	3,458,828,536	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	287,000	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	290,812,560	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	191,312,523	0
3.0	521211	Belanja Bahan	654,630,004	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	1,976,522,740	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	68,716,509	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	325,472,016	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	3,685,200	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	25,942,450	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT WILAYAH

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
UNIT ORGANISASI : (01) Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
WILAYAH/PROVINSI : (115013200KD) BA(115) ES1(01) KEPULAUAN RIAU

Tgl Data : 07/05/26 6:36 AM
Tgl Cetak : 07/05/26 1:51 PM
Halaman : 2
lap_neraca_percobaan_kas_uappaw_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522141	Belanja Sewa	2,952,921,699	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	315,604,800	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	674,952,493	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	517,187,882	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6,247,153,707	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	630,395,000	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,417,393,180	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3,890,109,221	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,014,474,461	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	431
3.1	511123	Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS	0	540,000
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	555,000
3.1	511621	Pengembalian Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	0	744,390
3.1	511622	Pengembalian Belanja Tunjangan Anak PPPK	0	150,690
3.1	511625	Pengembalian Belanja Tunjangan Beras PPPK	0	434,520
3.1	521111	Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran	0	17,952,098
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	147,595,858
3.1	524113	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	160,000
3.1	524119	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar	0	63,187,784
JUMLAH			42,375,871,250	42,375,871,250

Keterangan :
FINAL

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT WILAYAH

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

UNIT ORGANISASI : (01) Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum

WILAYAH/PROVINSI : (115013200KD) BA(115) ES1(01) KEPULAUAN RIAU

Tgl Data : 07/05/26 6:36 AM

Tgl Cetak : 07/05/26 1:51 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_uappaw_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	131111	Tanah	32,642,899	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	18,363,327,047	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	161,218,481	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	11,434,181,364
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	17,734,035
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	160,241,816	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi	117,272,701	0
0.0	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	77,200,000	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	0	117,272,701
0.0	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak	0	77,200,000
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	9,011,413
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	5,006,142
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	160,241,816
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	32,703,033,912
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	19,988,340	0
0.0	313211	Transfer Keluar	44,434,700	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	44,434,700
0.0	391111	Ekuitas	0	42,148,176,484
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	1,774,800	0
0.0	391119	Koreksi Lainnya	26,797,315,637	0
0.0	391131	Pengesahan Hibah Langsung	0	1,826,400,000
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	2,568,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang	0	8
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang	0	13,513,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	1,346,715,360	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	20,290	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	76,876,108	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	19,538,058	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	83,150,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	40,084,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	5,983,519	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	77,706,660	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	318,448,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	62,645,000	0
3.0	511332	Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara	4,660,935,150	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	3,114,176,640	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	48,771	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	203,106,080	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT WILAYAH

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

UNIT ORGANISASI : (01) Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum

WILAYAH/PROVINSI : (115013200KD) BA(115) ES1(01) KEPULAUAN RIAU

Tgl Data : 07/05/26 6:36 AM

Tgl Cetak : 07/05/26 1:51 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_uappaw_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	55,671,342	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	271,375,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	189,838,825	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	614,470,000	0
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	26,645,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	134,956,000	0
3.0	512212	Beban Uang Lembur PPPK	187,658,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1,992,986,080	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	3,204,210,411	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	3,437,479,721	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	287,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	290,812,560	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	191,312,523	0
3.0	521211	Beban Bahan	654,630,004	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	1,963,867,740	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	68,716,509	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	328,482,708	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	3,685,200	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	26,250,300	0
3.0	522141	Beban Sewa	4,232,547,132	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	315,604,800	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	674,952,493	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	517,187,882	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	6,098,027,849	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	630,235,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,417,393,180	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3,826,921,437	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1,414,494,452	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	3,224,370	0
JUMLAH			88,558,773,575	88,558,773,575

Keterangan :

FINAL

NERACA
TINGKAT WILAYAH
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
UNIT ORGANISASI : (01) Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
UAPPAW : (115013200KD) BA(115) ES1(01) KEPULAUAN RIAU

Tgl Data : 07/05/26 6:36 AM
Tgl Cetak : 07/05/26 1:51 PM
Halaman : 1
lap_neraca_uappaw_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Lainnya dan Setara Kas	0	36,222,751,196	(36,222,751,196)	(100.00)
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	0	1,279,625,433	(1,279,625,433)	(100.00)
JUMLAH ASET LANCAR	0	37,502,376,629	(37,502,376,629)	(100.00)
ASET TETAP				
Tanah	32,642,899	32,642,899	0	0.00
Peralatan dan Mesin	18,363,327,047	14,641,697,287	3,721,629,760	25.42
Gedung dan Bangunan	161,218,481	161,218,481	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(11,451,915,399)	(10,151,666,478)	(1,300,248,921)	12.81
JUMLAH ASET TETAP	7,105,273,028	4,683,892,189	2,421,380,839	51.70
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	0	77,200,000	(77,200,000)	(100.00)
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	160,241,816	0	160,241,816	0.00
Aset Lain-lain	194,472,701	0	194,472,701	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(194,472,701)	(77,200,000)	(117,272,701)	151.91
JUMLAH ASET LAINNYA	160,241,816	0	160,241,816	
JUMLAH ASET	7,265,514,844	42,186,268,818	(34,920,753,974)	(82.78)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	174,259,371	38,092,334	136,167,037	357.47
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	174,259,371	38,092,334	136,167,037	357.47
JUMLAH KEWAJIBAN	174,259,371	38,092,334	136,167,037	357.47
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	7,091,255,473	42,148,176,484	(35,056,921,011)	(83.18)
JUMLAH EKUITAS	7,091,255,473	42,148,176,484	(35,056,921,011)	(83.18)
JUMLAH EKUITAS	7,091,255,473	42,148,176,484	(35,056,921,011)	(83.18)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	7,265,514,844	42,186,268,818	(34,920,753,974)	(82.78)

Keterangan :
FINAL

LAPORAN REALISASI ANGGARAN WILAYAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 115
UAPPAW : BA(115) ES1(01) KEPULAUAN RIAU 115013200KD

Tgl Data : 07/05/26 7:30 AM
Tgl Cetak : 07/05/26 1:51 PM
Halaman : 1
lap_lra_face_uappaw_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	19,988,340	19,988,340	0	0	179,408,136	179,408,136	0
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	19,988,340	19,988,340	0	0	179,408,136	179,408,136	0
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	0	19,988,340	19,988,340	0	0	179,408,136	179,408,136	0
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	45,073,063,000	42,124,562,139	(2,948,500,861)	93.46	217,363,297,000	170,506,866,328	(46,856,430,672)	78.44
1. Belanja Pegawai	18,411,790,000	16,697,055,898	(1,714,734,102)	90.69	10,672,847,000	10,021,933,878	(650,913,122)	93.9
2. Belanja Barang	24,641,773,000	23,413,031,780	(1,228,741,220)	95.01	202,140,844,000	156,141,844,450	(45,998,999,550)	77.24
3. Belanja Modal	2,019,500,000	2,014,474,461	(5,025,539)	99.75	4,549,606,000	4,343,088,000	(206,518,000)	95.46
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN WILAYAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 115
UAPPAW : BA(115) ES1(01) KEPULAUAN RIAU 115013200KD

Tgl Data : 07/05/26 7:30 AM
Tgl Cetak : 07/05/26 1:51 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_uappaw_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	45,073,063,000	42,124,562,139	(2,948,500,861)	93.46	217,363,297,000	170,506,866,328	(46,856,430,672)	78.44
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT WILAYAH

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

UNIT ORGANISASI : (01) Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum

WILAYAH/PROVINSI : (115013200KD) BA(115) ES1(01) KEPULAUAN RIAU

Tgl Data : 07/05/26 6:36 AM

Tgl Cetak : 07/05/26 1:51 PM

Halaman : 1

lap_lpe_uappaw_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	42,148,176,484	42,645,220,914	(497,044,430)	(1.17)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(42,767,276,146)	(166,084,903,086)	123,317,626,940	(74.25)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(26,799,090,437)	10,680,000	(26,809,770,437)	(251,027.81)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(1,774,800)	10,680,000	(12,454,800)	(116.62)
LAIN-LAIN	(26,797,315,637)	0	(26,797,315,637)	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	34,509,445,572	165,577,178,656	(131,067,733,084)	(79.16)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(35,056,921,011)	(497,044,430)	(34,559,876,581)	6,953.08
EKUITAS AKHIR	7,091,255,473	42,148,176,484	(35,056,921,011)	(83.18)

Keterangan :

FINAL